

**IMPLIKASI PEMBERHENTIAN SYAHRUL YASIN LIMPO SEBAGAI
KETUA UMUM DPD SUL - SEL TERHADAP EKSISTENSI
PARTAI GOLONGAN KARYA SUL - SEL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, Dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Oleh;

ASWIN

NIM: 30600113030

FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aswin

NIM : 30600113030

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/ 14 Juni 1995

Jurusan/Prodi : Ilmu Politik

Fakultas/Program : Ushuluddin, Filsafat dan Politik/ Strata 1 (S1)

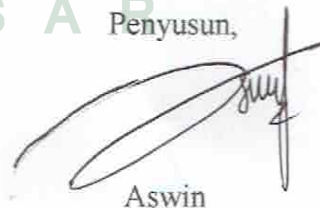
Alamat : Hertasning Baru

Judul : IMPLIKASI PEMBERHENTIAN SYAHRUL YASIN
LIMPO SEBAGAI KETUA UMUM DPD SUL-SEL
TERHADAP EKSISTENSI PARTAI GOLONGAN KARYA
SUL-SEL

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibua toleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 3 Agustus 2017

Penyusun,



Aswin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, hanya dengan izin-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw dan keluarga serta sahabat-sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai Allah swt. Aamiin

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu penulis selama ini, mereka adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir, M.si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Natsir, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Syahrir Karim, M.Si., Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Ibu Ismah Tita Ruslin S.IP, M.Si dan Ibu Nur Aliyah Zainal, S.IP, MA., selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan ide kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ramli, M.Si dan Ibu Dr. Darmawati H.S.Ag, M.HI selaku penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
7. Segenap dosen, pegawai dan seluruh staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah mencurahkan ilmunya tanpa pamrih serta motivasi, nasihat, dan pelayanannya selama penulis dalam perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan fasilitas dan membantu menyediakan referensi selama masa perkuliahan dan pembuatan skripsi.
9. Terutama dan Teristimewa kepada Ayahanda Nur Azis dan Ibunda Aspiani tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya,

perhatian dan motivasi dukungan serta doa yang tulus dalam keberhasilan penulisan sampai sekarang ini.

10. Keluarga besar penulis yang selalu ada buat saya selama kuliah bahkan sampai penyelesaian ini dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang memberikan semangat kepada penulis.

11. Kepada saudara seperjuangan terutama kelas 1 dan 2 Ilmu Politik 013 yang selalu ada selama kurang lebih empat tahun. Dan saudara seperjuangan senior dan junior Pondok Al- Mubaraq yang telah memberikan semangat, kebersamaan dan bantuannya kepada penulis selama menumpuh perkuliahan bahkan penyelesaian skripsi ini.

12. Teman-teman KKN angkatan 53 UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelajaran tentang arti pentingnya kebersamaan dan mengajarkan kepada penulis tentang kerjasama tim dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga segala dukungan dan bantuan semua pihak mendapatkan pahala dari Allah swt. semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Samata, 24 Juli 2017

Aswin

NIM: 30600113030



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-18
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan.....	10
D. Kegunaan	11
E. Kajian Pustaka	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	18-23
A. Institusionalisme Normative	18
B. Partai Politik.....	19
C. Elite Politik	21
D. Kerangka Konseptual	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24-26
A. Lokasi Penelitian	24
B. Jenis Penelitian.....	24
C. Subjek/Objek Penelitian.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27-72
A. Gambaran Umum Kota Makassar	27
B. Gambaran Umum Partai Golkar	29
1. Sejarah Partai Golkar.....	29
2. Visi Partai Golkar	35
3. Misi Partai Golkar	35
4. Tujuan Partai Golkar	36
5. Struktur Organisasi Sayap Partai Golkar.....	37

C. Biografi Politik Syahrul Yasin Limpo	38
D. Partai Golkar Dibawah Kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo2009-2014	44
E. Penyebab Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo Sebagai Ketua DPD Sul-Sel.....	53
F. Eksistensi partai golkar pasca pemberhentian Syahrul yasin Limpo	62
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Impilkasi Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR TABEL

Tabel I	
Perbandingan Data Perolehan Suara Partai Golkar Di Sul-Sel Pada Pemilu 2009 dan 2014	45
Tabel II	
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Prov. Sul-Sel 2007	48
Tabel III	
Peta Dukungan Partai Politik terhadap Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sul-Sel 2007	49
Tabel IV	
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Prov. Sul-Sel 2013	50
Tabel V	
Peta Dukungan Partai Politik Terhadap Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sul-Sel 2013	51
Tabel VI	
Susunan Pengurus Partai Golkar Pada Masa Syahrul Yasin Limpo Dan Nurdin Halid	63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Aswin

NIM : 30600113030

Judul : IMPLIKASI PEMBERHENTIAN SYAHRUL YASIN LIMPO
SEBAGAI KETUA UMUM DPD SUL - SEL TERHADAP
EKSISTENSI PARTAI GOLONGAN KARYA SUL-SEL

Seteru Setya Novanto dan Syahrul Yasin Limpo dalam Musyawarah Nasional pemilihan Ketua Umum Partai Golkar di Bali menyebabkan Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo Sebagai Ketua Umum DPD Partai Golkar Sul-Sel. Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo membuat beberapa elit Partai Golkar pindah Partai dan menyesalkan terpilihnya Nurdin Halid sebagai ketua DPD Partai Golkar Sul-Sel. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1).Apa penyebab pemberhentian Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua Umum DPD Partai Golkar Sul-Sel. (2).Bagaimana Eksistensi Partai Golkar Sul-Sel pasca Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, perilaku orang atau keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi literatur.

Hasil penelitian ini adalah (1).Penyebab pemberhentian Syahrul Yasin Limpo terlihat dari Konflik yang terjadi pada Partai Golkar di mana adanya Munaslub Partai Golkar Di di Jakarta dan Bali dualisme ini mempengaruhi seteru Setya Novanto dan Syahrul Yasin Limpo yang sebelumnya sebagai kandidat untuk menjadi ketua DPP Partai Golkar. Dan Setya Novanto sebagai Ketua saat ini. Kini Syahrul Yasin Limpo diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPD Partai Golkar Sul-Sel.Dan pemberhentian Syahrul Yasin Limpo dianggap tidak terhormat. Hal ini dikarenakan pemberhentiannya tanpa melalui Mubes dan sudah menjabat dua periode.(2).Pasca pemberhentian Syahrul Yasin Limpo kini eksistensinya di Partai Golkar Sul-Sel semakin berkurang hal ini dikarenakan adanya elit-elit yang berpindah mendukung Nurdin Halid.Kehadiran Nurdin Halid ingin menunjukkan bahwa kehadirannya akan banyak mengubah pengendalian Partai Golkar Sul-Sel ini terlihat dari gaya kepemimpinannya yang sangat transformatif di mana beban kerja tersalurkan dengan merata kepada kader tidak seperti pada kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo sebelumnya yang lebih banyak bertumpu pada segelintir orang.

Implikasi penelitian ini adalah (1) Diharapkan agar konflik internal yang terjadi di Partai Golkar Sel-Sel antara kubu Syahrul Yasin Limpo dengan Nurdin Halid cepat mendapat titik terang dan bersatu kembali demi kemajuan Partai Golkar kedepannya dan (2) Diharapkan dengan tergantinya ketua DPD partai Golkar Sul-Sel yang baru oleh Nurdin Halid bisa membawa kembali kejayaan Partai Golkar Di Sul-Sel di masa depan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diawal masa Reformasi, Euphoria kebebasan politik telah memberi celah munculnya kekuatan-kekuatan politik baru yang selama masa Orde Baru tidak dimungkinkan terjadi. Pembatasan jumlah partai politik di era Orde Baru telah berubah menjadi era multipartai pada Pemilu tahun 1999 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Dapat dilihat pada Pemilu tahun 1999 adanya 141 partai politik yang terdaftar di departemen kehakiman, namun yang ikut dalam pemilu saat itu hanya 48 partai politik saja setelah dilakukannya verifikasi.¹ Pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan 6 partai local di Aceh. Sebenarnya semangat ini pernah muncul diawal kemerdekaan sebagai buah dari revolusi panjang sebuah negara dalam melawan penindasan kolonial. Euphoria kebebasan politik waktu itu sangat tergambarkan oleh muncul banyak sekali partai politik dengan segala aliran yang menjadi basis dari ideologinya. Namun bedanya dengan Partai politik tahun 50an atau partai politik generasi kedua itu adalah tidak adanya ideologi yang jelas pada partai politik generasi keempat ini.

Demokrasi yang diusung di era reformasi mengarah pada demokrasi partisipatif atau langsung, salah satunya karena banyak pejabat politik yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga legitimasi mereka lemah.

¹Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*, (Malang:Setara Perss, 2009) hal. 160-168.

Di sisi lain memunculkan ketidakpercayaan rakyat pada penguasa mendorong rekrutmen pejabat politik ke arah demokrasi langsung. Sehingga tidak mengherankan bila rekrutmen hampir semua jabatan politik dilaksanakan dalam format demokrasi yang bergerak pada hubungan negara dan warga negara secara langsung. Fase demokrasi langsung ini merupakan era baru reformasi politik di Indonesia yang pertama kali digelar sejak kemerdekaan Indonesia. Rekrutmen politik skala nasional ini merupakan perkembangan demokrasi yang mendapat pengakuan dunia karena keberhasilannya. Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan rekrutmen politik dalam tataran demokrasi ini, pada tahun 2005 telah dilakukan proses rekrutmen politik elit daerah sebagai kelanjutan dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang telah melahirkan pasangan pemimpin politik berbasis legitimasi rakyat, yaitu Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla.²

Partai politik pada awalnya dibentuk atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diuraikan bahwa partai politik merupakan kelompok terorganisir, dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.³

²Romli Mubarak, Peranan Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi Pasca Reformasi Di Indonesia, *Jurnal*, Vol.10 No.1 Oktober 2012, hal. 2.

³Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 404.

Peranan partai politik sebagai pilar demokrasi dimana partai Golkar sebagai sarana komunikasi politik yang dibutuhkan oleh masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dengan cara seperti apa dan bagaimana capaian yang dikehendaki.⁴ Sebagai sarana sosialisasi politik. Dimana partai Golkar berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan penyadaran hukum dan politik kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui produk hukum daerah dan arah kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah.⁵ Sebagai sarana recruitment politik. Dimana partai Golkar melakukan kaderisasi pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang mereka pegang.⁶ Sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Management*). Dimana Partai Golkar mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.⁷

Sebagai negara demokratis, kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan, dimana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi

⁴Romli Mubarak, Peranan Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi Pasca Reformasi Di Indonesia, *Jurnal*, Vol.10 No.1 Oktober 2012, hal. 5.

⁵Romli Mubarak, Peranan Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi Pasca Reformasi Di Indonesia,....., hal. 6.

⁶Romli Mubarak, Peranan Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi Pasca Reformasi Di Indonesia,....., hal. 6.

⁷Romli Mubarak, Peranan Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi Pasca Reformasi Di Indonesia,, hal. 7.

rakyat, penyeimbang kekuatan politik serta sebagai pengkritik dan kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Qur'an Surah Ali Imran/3:104.

هُمُ وَأُولَٰئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْعُرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَىٰ يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُن
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.*⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa ma'ruf segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan, dimana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, penyeimbang kekuatan politik serta sebagai pengkritik dan kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa.

Namun, dengan banyaknya partai politik tidak jarang terjadi benturan-benturan kepentingan politik antar partai. Sehingga kecenderungan partai politik lebih fokus mengurus kepentingan partainya saja dan melupakan fungsi pokoknya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Sikap dan perilaku partai politik yang dianggap sudah menyeleweng, diperparah oleh sikap dan perilaku banyak anggotanya, dimana anggota partai politik yang duduk dalam pemerintah dan DPR bukan berfungsi sebagai wakil rakyat melainkan hanya sebagai wakil partai

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, (Surabaya: Fajar Mulya) hal.63.

politik. Para kaum elit politik yang hanya mengejar kepentingannya dengan membentuk partai politik tanpa menghiraukan apakah partai politik itu memperjuangkan platform tertentu, hal tersebut mengakibatkan jumlah partai politik yang tidak terkendali tanpa ada identitas politik tertentu bagi masing-masing partai politik.

Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Zalzalah/99:7-8.

يَرَهُ شَرِّ اَذْرَةٍ مِّثْقَالِ يَعْمَلُ وَمَنْ يَرَهُ خَيْرَ اَذْرَةٍ مِّثْقَالِ يَعْمَلُ فَمَنْ

Terjemahnya:

*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”.*⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, apabila melakukan yang buruk akan mendapat balasanya. Keadaan demikian menimbulkan kehidupan politik yang jauh dari mendukung terwujudnya kesejahteraan bangsa. Sikap serta perilaku partai politik yang menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga kecenderungan partai politik lebih fokus mengurus kepentingan partainya saja dan melupakan fungsi pokoknya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Sikap dan perilaku partai politik yang dianggap sudah menyeleweng.

Hal demikian dikarenakan sikap apatis terhadap kegiatan politik dimungkinkan muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan politik, dikarenakan adanya kekecewaan serta frustrasi terhadap sistem politik

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya) hal.599.

yang ada. Kondisi seperti ini memunculkan kalangan masyarakat yang apatis dan bahkan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan menjadi Golput (golongan putih).¹⁰

Sebagaimana Islam juga menyuruh seorang pemimpin untuk tidak melupakan tugas dan kewajibannya serta mengurus kebutuhan masyarakat, sebagaimana hadis berikut:

شَيْئًا لِمُسْلِمٍ أُمُورَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَاجَتُهُمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَرَهُمْ حَاجَتِهِ

Artinya:

“Barangsiapa yang disertai kepemimpinan terhadap urusan kaum muslimin namun ia menutup diri tidak mau tahu kebutuhan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya dan kefakirannya di hari kiamat”.¹¹

Hadis ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya Islam memandang persoalan kepemimpinan, sehingga di dalam agama Islam menyuruh seorang pemimpin untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar tidak ada lagi kekecewaan yang di alami oleh masyarakatnya.

Dalam studi Ilmu Politik salah satu cara mendapatkan jabatan kepemimpinan ialah dengan cara Partai Politik. Penelitian ini memfokuskan pada Partai Politik Golkar pasca pemberhentian Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua Umum DPD Sul-Sel.

¹⁰Ahmad Syaiful Ashar, “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, (Semarang: Program Studi Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011) hal. 1-2.

¹¹Hasan. Diriwayatkan Oleh Abu Dawud (No. 2948), At-Tirmidziy (No. 1333), Serta Al-Hakim (3/99) Dan Ia Menshahihkannya Yang Kemudian Disepakati Oleh Adz-Dzahabi; Semuanya Dari Hadits Abbu Maryam ‘Amr Bin Murrah Al-Juhhaniy.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golongan Karya bermula dengan berdirinya Sekber Golongan Karya pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golongan Karya berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Sepanjang sejarah era reformasi, suksesi kekuasaan politik Partai Golkar sebetulnya tidak selalu mulus. Tarik-menarik kepentingan senantiasa mewarnai pergeseran penguasaan elite di parpol beringin.¹² Kisruh kepengurusan Partai Golkar yang berlarut-larut selama 1,5 tahun terakhir tampaknya mulai menggerus keyakinan publik terhadap partai beringin ini. Jika tak ada penyelesaian yang memadai, partai besar yang pernah menguasai politik Indonesia ini bisa bergeser menjadi Parpol kecil.

Kekisruhan mulai nampak jelang pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Dimana proses pemilihan berlangsung cukup alot setelah Seteya Novanto dan Ade Kamaruddin berhasil meraih 30 persen suara pada putaran pertama, Novanto meraih 277 suara, Ade Kamaruddi meraih 173 suara, Aziz Syamsuddin: 48 suara, Syahrul Yasin Limpo: 27 suara, Airlangga Hartarto: 14 suara, Mahyudin: 2 suara,

¹²Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya. <http://Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm>.13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

Priyo Budi Santoso: 1 suara, Indra Bambang Utoyo: 1 suara. Yang dimenangkan oleh Setya Novanto.¹³

Ketua Umum Partai Golkar saat ini ialah Setya Novanto yang berhasil meraih suara terbanyak pada (*voting*) tertutup yang digelar dalam Munaslub PartaiGolkar. Pemilihan seharusnya masuk ke tahap kedua dengan memilih Setya Novanto atau Ade Kamaruddin. Akan tetapi, pemilihan tahap kedua ini tidak berlanjut setelah Ade menyatakan mundur dari pemilhan dan mengalihkan dukungannya untuk Setya Novanto.¹⁴

Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan seteru Setya Novanto dalam Munaslub Golkar di Bali pada Maret lalu. Kini, Syahrul Yasin Limpo tidak lagi memiliki jabatan apa-apa di Golkar. Syahrul Yasin Limpo dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Pencopotan Syahrul langsung ditanda tangani oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Setya Novanto memberhentikan SYL dengan alasan sudah dua kali menjabat ketua DPD I Golkar Sulsel. Dan DPP Partai Golkar tidak lagi memperpanjang masa bakti DPD-DPD I Golkar di Indonesia yang sampai hari ini belum menggelar Musda termasuk di Sulsel. Posisi Syahrul langsung diisi oleh Ketua harian Partai Golkar, Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas sementara.Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP

¹³Kompas, Kemengangan Setya Novanto.<http://Kompas, Kemengangan Setya Novanto.htm>. 13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

¹⁴Kompas, Kemengangan Setya Novanto.<http://Kompas, Kemengangan Setya Novanto.htm>. 13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

Partai Golkar, Yorrys Raweyai membela dan membenarkan keputusan Setya Novanto soal pencopotan Syahrul dari Ketua DPD I Sulawesi Selatan.¹⁵

Keputusan DPP Golkar dengan penunjukan Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, mulai berimbas dengan rencana hengkangnya sejumlah elite partai besutan Setya Novanto. Salah satunya adalah Wakil Bendahara Golkar Sidrap Rezky Jabir. Reszky secara tegas mengatakan niatnya untuk mundur dari Golkar, pasalnya penundaan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) Golkar dan keluarnya Surat Keputusan (SK) Plt Golkar Sulsel dengan penunjukan ketua DPP Golkar Nurdin Halid. “Ada kesan hal ini sengaja dipaksakan, bisa jadi berkaitan dengan Pilgub 2018,”ujarnya.¹⁶

Berbeda halnya dengan rencana mundurnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Kabupaten Takalar, Natsir Ibrahim untuk pindah ke partai NasDem. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulsel dibawah kepemimpinan H Rusdi Masse (RMS), kini terus melakukan manuver politik untuk menggalang kader potensial. Keinginan berNasDem Natsir Ibrahim diungkapkan, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Daerah DPW NasDem Sulsel, Dahlan Gege usai kunjungan Natsir ke Sekretariat DPW NasDem Sulsel di Jalan Hertasning Makassar.¹⁷ Sekedar diketahui, hijrah politik yang dilakukan RMS dari partai Golkar ke partai NasDem Sulsel sebagai

¹⁵Merdeka.Com.Setnov Copot Syahrul Karena Habis Jabatannya Dan Lambat Gelar Musda. 31 Agustus 2016 (Diakses 11 Oktober 2016).

¹⁶Parepos. Co.id. Elit Golkar Siap Ancam Mundur. [http:// Elite Golkar Sidrap Ancam Mundur – Pare Pos – Online.html](http://EliteGolkarSidrapAncamMundur-ParePos-Online.html). (Diakses 30 November 2016).

¹⁷Parepos. Co.id. Elit Golkar Siap Ancam Mundur. [http:// Elite Golkar Sidrap Ancam Mundur – Pare Pos – Online.html](http://EliteGolkarSidrapAncamMundur-ParePos-Online.html). (Diakses 30 November 2016).

ketua DPW, diakui sejumlah pihak kalau partai Golkar Sulsel kehilangan salah seorang tokoh, apalagi menyusul kepergian SYL sebagai figur yang memiliki efek, maka masa depan Golkar Sulsel sangat sulit diprediksi.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Implikasi Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo Sebagai Ketua Umum DPD Sul-Sel Terhadap Eksistensi Partai Golongan Karya Sul-Sel.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang telah diteliti, maka penulis membatasinya pada persoalan sebagai berikut:

1. Apa penyebab pemberhentian Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua Umum DPD Partai Golkar Sul-Sel?
2. Bagaimana Eksistensi Partai Golkar Sul-Sel pasca Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo?

C. Tujuan

Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab pemberhentian Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua Umum DPD Partai Golkar Sul-Sel.
2. Untuk mengetahui Eksistensi Partai Golkar Sul-Sel pasca Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo.

¹⁸IniKataPolitik. Pengurus Golkar Sidrap Tolak Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel. [http://Pengurus Golkar Sidrap Tolak Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel – Inikatapolitik.html](http://PengurusGolkarSidrapTolakPltKetuaDPDIPartaiGolkarSulsel-Inikatapolitik.html). (Diakses 30 November 2016).

D. Kegunaan

a. Secara teoritis

Menjawab fenomena Sosial-Politik yang ada khususnya dalam perpolitikan lokal dan memperkaya kajian ilmu politik untuk perkembangan keilmuan, khususnya masalah partai politik.

b. Secara Akademis

Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas partai politik Dalam Implikasi Pemeberhentian Syahrul Yasin Limpo Sebagai Ketua Umum DPD Sul-Sel Terhadap Eksistensi Partai Golkar.

E. Kajian Pustaka

Adapun tulisan yang hampir sama atau bahkan mirip dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Masalah	Metode penelitian	Hasil
1	Achmad Thufeil Efendi ¹⁹	Dampak Konflik DPP Partai Golkar Terhadap DPP Partai Golkar Kota Surabaya	Kepentingan Syahrul Yasin Limpo memilih Farouk M.Betta untuk menjadi calon wakil walikota Makassar semata-mata untuk memenangkan pemilu di Kota Makassar dan hasil survei Farouk lebih tinggi dibanding dengan Kadir Halid, kepentingan	Kualitatif	Dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut: 1) dampak yang dirasakan oleh DPD Partai Golkar Kota Surabaya terletak pada digantinya Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Adies Kadir menjadi Muhammad Alyas serta turunnya kinerja partai; 2) sikap

¹⁹Achmad Thufeil Efendi, "Dampak Konflik Dpp Partai Golkar Terhadap Dpp Partai Golkar Kota Surabaya", *Skripsi*, (Surabaya: Program Studi Ilmu Politik Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2015) hal. Vii.

			<p>Nurdin halid mendorong adiknya sebagai calon wakil walikota Makassar karena kedepannya Nurdin ingin mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulsel, sehingga apabila pasangan Supomo-Kadir terpilih maka Nurdin Halid lebih mudah untuk memperoleh suara di Kota Makassar dan Nurdin juga ingin menegaskan bahwa kekuatan politik dalam Partai Golkar di Sulawesi Selatan tidak hanya dikendarai oleh S YL semata, tapi Nurdin juga mempunyai kekuatan dalam Partai Golkar.</p>		<p>politik yang diambil oleh DPD Partai Golkar Kota Surabaya dalam menghadapi konflik internal yang terjadi dengan cenderung untuk mengikuti kubu Partai Golkar dengan kepemimpinan Aburizal Bakrie yang dianggap sah, namun setelah peniliti menggali lebih dalam ternyata di dalam tubuh DPD Partai Golkar Kota Surabaya pun terjadi perpecahan akibat konflik tersebut dengan adanya kedua kubu yang mengikuti masing-masing kepemimpinan DPD Partai Golkar.</p>
2	Muhaimmahtun Nasikhah ²⁰	Konflik Terpecahnya Partai Golkar (Munas Bali Dan Munas Jakarta)	<p>Konflik atau problematika partai ini berawal dari ARB tidak berhasil menjadi Capres atau Cawapres, melainkan mengusung pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. Upaya Partai Golkar mengusung Prabowo-Hatta ternyata tidak diikuti oleh semua pengurus, fungsionaris dan kader Partai Golkar.</p>		<p>Konflik partai golkar belum juga menemukan titik temu penyelesaian konflik-konflik yang dialami malahan terus melahirkan konflik yang berkelanjutan sehingga mengakibatkan terpecahnya partai golkar menjadi dua kubu yaitu Munas Bali dan Munas Jakarta. Ke dua kubu tersebut sangat bertentangan. Munas Bali memilih ARB sebagai</p>

²⁰Muhimmatun Nasikhah,” Konflik Terpecahnya Paartai Golkar (Munas Bali Dan Munas Jakarta)”, *Laporan*, (Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014) hal. 13.

			Beberapa pengurus, fungsionaris dan kader mendukung pasangan Jokowi-JK untuk Pilpres yang digelar pada 7 Juli 2014		ketua umum, sedangkan Munas Jakarta mengadakan calon tunggal ketua umum yang dipuaskan ke dua kandidat. Munas Bali tetap berada di koalisi merah putih, sedangkan Munas Jakarta mendukung pemerintahan Jokowi-JK, dan masih banyak hal-hal yang bertengan antara keduanya.
3	Asmadianto ²¹	Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Selatan	Partai Golkar adalah partai yang berada pada posisi kedua pemenang Pemilu 2014 kemarin, akan tetapi Golkar tidak memilih/memutuskan calon Presiden. Kondisi demikian merupakan awal mencuatnya konflik di tubuh internal DPD partai Golkar Sulbar, dimana terjadinya perbedaan pandangan kader di daerah terhadap arah koalisi yang dibangun pengurus DPP dibawah kepemimpinan Aburizal Bakri. Perbedaan tersebut mengarahkan pada pemecatan Anwar Adnan Saleh selaku ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi	Deskriptif Kualitatif	Pertama, penyebab terjadinya konflik adalah akibat dilakukannya penonaktifan ketua DPD I Golkar oleh pengurus DPP yang melibatkan aksi protes sejumlah kader didaerah atas pemecatan itu. Kedua, kehadiran Nurdin Halid selaku Pelaksana Tugas (Plt) semakin memperpanas embrio konflik di Internal Partai. Ketiga, akibat dilakukannya pemecatan oleh pengurus DPP kepada Anwar membuat sebagian pengurus DPD lainnya ikut menyoroti dan memperpanas konflik karena menganggap pengurus pusat tidak

²¹Asmadianto, "Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Selatan", *Tesis*, (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015) hal. X.

			Barat		mempertimbangkan akibat dari pemecatan tersebut Keempat, perpecahan yang terjadi di internal Golkar Sulbar sangat berdampak pada elektabilitas kader dalam pencalonan kepala daerah dikarenakan kesibukan dalam menengarahi konflik Golkar, sehingga dibeberapa daerah kabupaten memaksa pengurus melakukan penjarangan figur untuk memenangkan Pilkada.
4	Yulion Zalpha ²²	Analisis Konflik Pada Munas Golkar 2014	Konflik internal yang terjadi dalam tubuh partai beringin (Golkar) pasca pilpres 2014. Sebelumnya dua partai lain, yaitu partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyajikan konflik internal di tubuh partai masing-masing dan mencuat ke publik. Sebagai sebuah organisasi, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap partai mempunyai dinamika dan permasalahan internal. Partai yang mempunyai dimensi kesisteman		Konflik internal yang terjadi pada Partai Golkar tahun 2014. Konflik ini bermula karena kekuasaan Pemerintah bersama Golkarnya yang mengarah pada totaliterisme, menghadirkan kekecewaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 9-11 Juli 1998 Golkar menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sebagai usaha membenahi kelembagaan Golkar, yang kemudian dinamai 'Partai Golkar'. Dalam munaslub tersebut, terpilih Akbar Tandjung

²²Yulion Zalpha. "Analisis Konflik Pada Munas Golkar 2014", *Jurnal*, Vol. 22. No 1, 2016 hal. 155.

			dan pelebagaan yang kuat akan lebih “matang” dalam mengatasi konflik yang terjadi di internal.		sebagai ketua umum Partai Golkar. Dengan demikian, eksistensi Partai Golkar tetap berlanjut, meskipun terdapat beberapa perubahan dasar seperti dalam visi dan misinya, yaitu: terbuka, mandiri, demokratis, moderat, mengakar, dan responsif. Bila dikaji dari segi tipologi, kelembagaan, atau pun analisis konflik yang terjadi pada Partai Golkar. Maka hal itu mencerminkan pragmatisme partai politik di Indonesia.
5	Synthia Warachma T.P. ²³	Konflik Internal Partai Golkar Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013	Pasca penetapan kadir Halid sebagai calon wakil walikota Makassar tahun 2013 menimbulkan konflik di internal Partai GOLKAR. Terpilihnya Kadir Halid sebagai calon wakil walikota Makassar menyebabkan adanya konflik antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid. Konflik dalam Partai GOLKAR juga disebabkan dengan hadirnya pasangan Irman Yasin Limpo dan Busrah	Kualitatif	Kepentingan Syahrul Yasin Limpo memilih Farouk M.Betta untuk menjadi calon wakil walikota Makassar semata-mata untuk memenangkan pemilu di Kota Makassar dan hasil survei Farouk lebih tinggi dibanding dengan Kadir Halid, kepentingan Nurdin Halid mendorong adiknya sebagai calon wakil walikota Makassar karena kedepannya Nurdin ingin mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulsel,

²³Synthia Warachma T.P.” Konflik Internal Partai Golkar Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013”, *Skripsi*, (Makassar: Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Dan Pemerintahan, Universitas Negeri Hasanuddin , 2011) hal.Viii

			<p>Abdullah, pasangan ini mengakibatkan terpecahnya suara partai GOLKAR sehingga Pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid mengalami kekalahan pada Pemilihan walikota Makassar tahun 2013.</p>		<p>sehingga apabila pasangan Supomo-Kadir terpilih maka Nurdin Halid lebih mudah untuk memperoleh suara di Kota Makassar dan Nurdin juga ingin menegaskan bahwa kekuatan politik dalam Partai Golkar di Sulawesi Selatan tidak hanya dikendarai oleh Syahrul YL semata, tapi Nurdin juga mempunyai kekuatan dalam Partai Golkar.</p>
6	Aswin	<p>Implikasi Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo Sebagai Ketua Umum DPD Sul-Sel Terhadap Eksistensi Partai Golongan Karya Sul-Sel</p>	<p>Seteru Setya Novanto dan Syahrul Yasin Limpo dalam Musyawarah Nasional pemilihan Ketua Umum Partai Golkar di Bali menyebabkan Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo Sebagai Ketua Umum DPD Partai Golkar Sul-Sel. Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo membuat beberapa elit Partai Golkar pindah Partai dan menyesalkan terpilihnya Nurdin Halid sebagai ketua DPD Partai Golkar Sul-Sel.</p>	Kualitatif	<p>(1).Syahrul Yasin Limpo diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPD Partai Golkar Sul-Sel. Dari pemberhentian Syahrul dari Ketua DPD Partai Golkar Sul-Sel dimana konflik internal yang terjadi pada Partai Golkar Sul-Sel menyebabkan perpecahan, ada kubu yang mendukung Syahrul dan ada yang ke kubu Nurdin Halid. Hal ini membuat eksistensi Syahrul di Partai Golkar Sul-Sel semakin berkurang dan membuat dirinya berkeinginan pindah Partai. (2).Selepas pemberhentian Syahrul Yasin Limpo keputusan DPP Partai Golkar</p>

					<p>mengirimkan Nurdin Halid menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sul-Sel menunjukkan betapa pentingnya kehadirannya terhadap eksistensi Partai Golkar Sul-Sel kedepannya. Kehadiran Nurdin Halid ingin menunjukkan bahwa kehadirannya akan banyak mengubah pengendalian Partai Golkar Sul-Sel ini terlihat dari gaya kepemimpinannya yang sangat transformatif dimana beban kerja tersalurkan dengan merata kepada kader tidak seperti pada kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo sebelumnya yang lebih banyak bertumpu pada segelintir orang.</p>
--	--	--	--	--	--

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teoritis

a. Teori Institusionalisme Normatif

Meski institusionalisme mungkin tidak pernah benar-benar menghilang, pada 1980-an paham ini telah dipandang sebagai berada diluar ilmu politik *mainstream* yang menciptakan istilah institusionalisme baru menyatakan bahwa institusi politik telah surut arti pentingnya dari posisi yang mereka pegang dalam teori-teori awal ilmuwan politik. Institusionalisme normatif menyatakan bahwa institusi politik mempengaruhi perilaku aktor dengan membentuk nilai, norma, kepentingan, identitas, dan keyakinan mereka.²⁴

Institusionalisme normatif menyatakan bahwa aturan dan struktur yang terlihat netral sebenarnya mengandung nilai (dan hubungan kekuasaan) dan menentukan perilaku yang tepat dalam setting tertentu.²⁵

Institusionalisme normatif menggambarkan organisasi sebagai *System Of Belief*. Para aktor lebih berfungsi sebagai anggota asosiasi profesi atau *Corporation* daripada makhluk kalkulatif dan selalu memaksimalkan kepuasan pribadinya. Para individu terikat pada nilai-nilai umum dan akan

²⁴Helmi Mahadi Dan Shohifullah, *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2010) hal. 112.

²⁵Helmi Mahadi Dan Shohifullah, *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2010) hal. 113.

menentukan tingkat kecendrungan mereka untuk berubah tetapi juga kapasitas organisasi untuk memproduksi.²⁶

b. Teori Partai Politik

Secara umum partai politik didefinisikan sebagai kumpulan orang yang membentuk sebuah partai yang bertujuan untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dengan cara yang legitimasi melalui pemilihan umum. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam perbuatan dan pelaksanaan keputusan.²⁷ Ideologi partai selain berfungsi sebagai dasar dan tujuan partai, juga berfungsi sebagai identitas dan sebagai pemersatu partai politik yang bersangkutan, hanya saja kadar ideologi suatu partai dengan partai lain mungkin berbeda.²⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik-(biasanya) dengan cara konstitusional-untuk melaksanakan programnya.²⁹

²⁶Rizki Kurniasari, Refi Agus Refina I Gde Fajar Kurniawan, "Metodologi Penelitian Non-Positivisme", (Pendidikan Profesi Akuntan & Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2015) hal. 5

²⁷K. Ramanathan, *Konsep Azas Politik*, (Jakarta: Alms Digital Enterprise, 2000) hal. 167.

²⁸Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013) hal. 40.

²⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hal. 403-404.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat/49:13.

أَكْرَمَكُمْ إِن تَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّا الْبَاقِيْنَ
خَيْرٌ عِلْمٌ لِّلَّهِ إِن تَقَاسَمُوا عِندَ

Terjemahnya:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*³⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi saling mengenal dan menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan kekayaan karena yang mulia diantara manusia disisi Allah hanyalah orang yang bertakwa kepada-Nya.

Menurut Prof. Miriam Budiaardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.³¹

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya) hal.517.

³¹Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik*, (Jakarta: Buku Obor, 1998) hal. 16.

Seorang serjana yang bernama Sigmund Neumann dalam buku karyanya *Modern Political Parties* memberikan definisi partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.³²

c. Teori Elite

Istilah elite etimologi berasal dari kata *eligere*, yang berarti memilih. Kata elite menunjuk pilihan, pilihan bangsa, budaya, kelompok, usia dan orang-orang yang menduduki posisi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, elite adalah sekelompok kecil orang dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting³³ atau elite diartikan sebagai sebuah kelompok atau kelas terpilih.³⁴ Dan elite itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas.³⁵

Elite selalu merupakan kelompok yang terbatas secara kuantitatif dan sangat menonjol dalam peran di level atas suatu komunitas atau masyarakat. Sedangkan elite survival adalah bagaimana strategi politik, sosial budaya dan ekonomi agar sekumpulan atau individu elite bisa

³²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 404.

³³Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 69-70.

³⁴Muslim Mufti Dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hal. 274.

³⁵H. Kabul Budiono, *Teori Dan Filsafat Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012). hal. 183.

bertahan atau bertransformasi menghadapi situasi baru terutama menyangkut persoalan ekonomi politik.³⁶

Secara konseptual, para ahli belum menemukan kesepakatan tentang definisi elite politik yang baku. Para ahli memberikan definisi sesuai dengan keahlian dan sudut pandang masing-masing. Dari beragamnya pendapat ahli tentang elite, Suzanna Keller mengelompokkan dua aliran.³⁷ Pertama, kelompok ahli yang beranggapan bahwa elite adalah golongan elite tunggal, yang biasa disebut elite politik. Ahli yang digolongkan dalam kategori ini adalah Aristoteles, Gaetano Mosca, dan Pareto. Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elite yang berkoeksistensi, berbagai kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. Para ahli yang termasuk kategori ini adalah Saint Simon, Karl Mannheim, dan Raymond Aron.

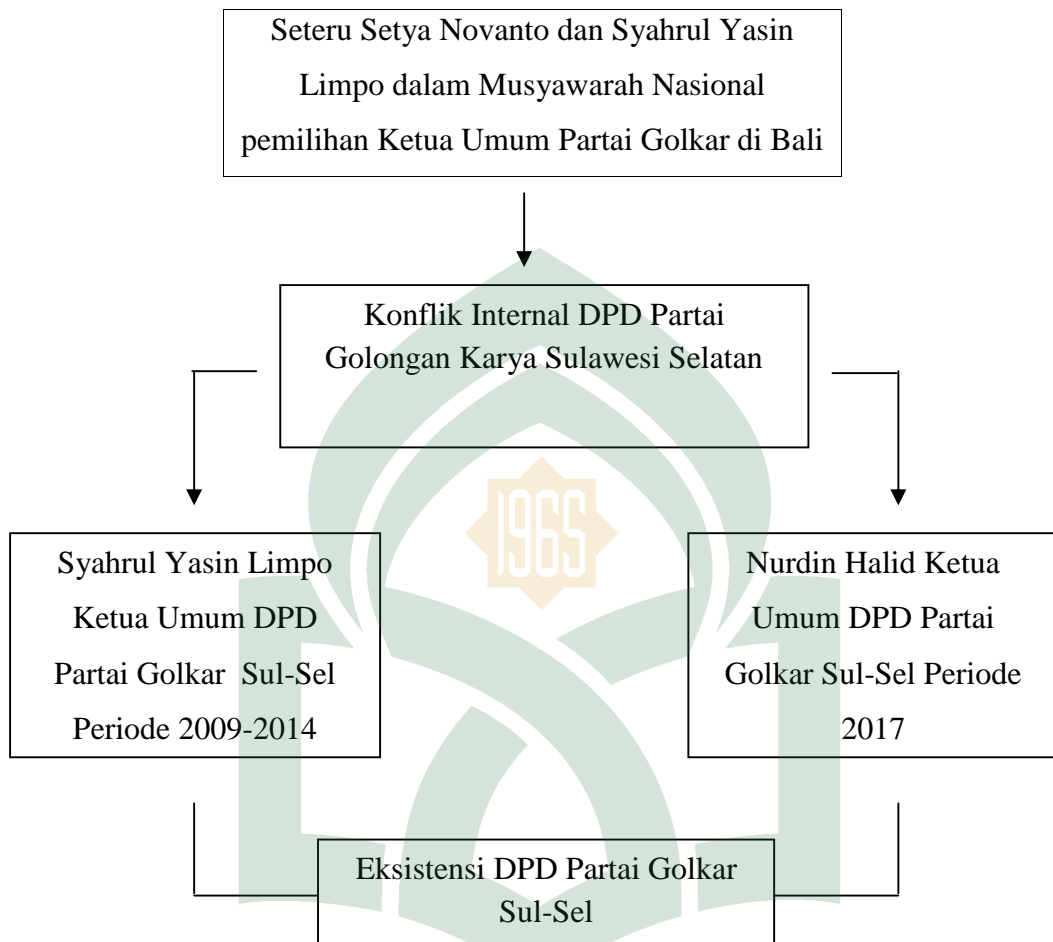
Menurut aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi ini merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik, bahwa pada setiap masyarakat terdapat minoritas yang membuat keputusan-keputusan besar.³⁸

³⁶David Efendi, *Politik Elite Muhammadiyah Studi Tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah*, (Reviva Cendekia, 2014) hal. 24.

³⁷Suzanna Keller, *Penguasa Dan Kelompok Elite: Peranan Elite Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995) hal. 5.

³⁸Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hal. 69-70.

d. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dengan fokus lokasi penelitian wilayah Kota Makassar di Kantor DPD Partai Golongan Karya Sulawesi Selatan dan Kantor DPD II Golongan Karya Kota Makassar.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas sistematis, faktual, akurat dan spesifik.³⁹ Penelitian kualitatif dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.⁴⁰

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal. 10.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 9.

C. Subjek/Objek penelitian

- a) Untuk mengumpulkan data, telah ditentukan para informan yang akan memberi informasi mengenai masalah yang diteliti.
- b) Informan elit Partai Golkar dalam penelitian ini:
 - Elit Partai Golongan Karya Kota SUL SEL : 1 orang
 - Elit Partai Golongan Karya Kota Makassar : 2 orang
 - Pengamat Politik : 2 orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan, dimana jawaban informan akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.⁴¹

2. Studi Literatur

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka.

⁴¹Lisa Harrison. *Metode penelitian politik* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 104.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian melakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan *editing* setiap data masuk. Setelah proses *editing* dilakukan proses *coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban informan menurut macam-macamnya. Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis.⁴² Dalam teknik analisis data, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.



⁴²Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 56-57.

BAB IV

HASIL PENELITIAN& PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.⁴³

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.⁴⁴

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten

⁴³Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . [http://BAB II GAMABARAN UMUM KONDISI DAERAH.pdf](http://BAB%20II%20GAMABARAN%20UMUM%20KONDISI%20DAERAH.pdf) (diakses 19 Juni 2017).

⁴⁴Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . [http://BAB II GAMABARAN UMUM KONDISI DAERAH.pdf](http://BAB%20II%20GAMABARAN%20UMUM%20KONDISI%20DAERAH.pdf) (diakses 19 Juni 2017).

Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.⁴⁵

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.⁴⁶

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Maros Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros Sebelah Barat : Selat Makassar.⁴⁷

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.⁴⁸

⁴⁵Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . [http://BAB II GAMABARAN UMUM KONDISI DAERAH.pdf](http://BAB%20II%20GAMABARAN%20UMUM%20KONDISI%20DAERAH.pdf) (diakses 19 Juni 2017).

⁴⁶Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . [http://BAB II GAMABARAN UMUM KONDISI DAERAH.pdf](http://BAB%20II%20GAMABARAN%20UMUM%20KONDISI%20DAERAH.pdf) (diakses 19 Juni 2017).

⁴⁷Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . [http://BAB II GAMABARAN UMUM KONDISI DAERAH.pdf](http://BAB%20II%20GAMABARAN%20UMUM%20KONDISI%20DAERAH.pdf) (diakses 19 Juni 2017).

⁴⁸Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . [http://BAB II GAMABARAN UMUM KONDISI DAERAH.pdf](http://BAB%20II%20GAMABARAN%20UMUM%20KONDISI%20DAERAH.pdf) (diakses 19 Juni 2017).

Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.⁴⁹

B. Gambaran Umum Partai Golkar

a. Sejarah Partai Golkar

Sejarah Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada akhir pemerintahan soekarno, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer khususnya Perwira Angkatan Darat yang menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, serta nelayan.

Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.⁵⁰

⁴⁹Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 . [http:// BAB II GAMABARAN UMUM KONDISI DAERAH.pdf](http://BAB%20II%20GAMABARAN%20UMUM%20KONDISI%20DAERAH.pdf) (diakses 19 Juni 2017).

⁵⁰"Sejarah", *Situs Resmi Partai Golkar Sul-Sel*. [http:// Sulsel.Partai Golkar.or.id/](http://Sulsel.PartaiGolkar.or.id/) (28 April 2017).

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

-) Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
-) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
-) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
-) Organisasi Profesi
-) Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
-) Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
-) Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971

Tujuh KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai

kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang.⁵¹

Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar. Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional.⁵²

NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar.⁵³

Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi,

⁵¹"Sejarah", *Situs Resmi Partai Golkar Sul-Sel*. <http://Sulsel.Partai Golkar.or.id/> (28 April 2017).

⁵²Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya. <http://Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm>.13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

⁵³Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya. <http://Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm>.13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).⁵⁴

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru.⁵⁵

Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.⁵⁶

Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai

⁵⁴"Sejarah", *Situs Resmi Partai Golkar Sul-Sel*. <http://Sulsel.Partai Golkar.or.id/> (28 April 2017).

⁵⁵Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya. <http://Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm>.13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

⁵⁶Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya. <http://Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm>.13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir.⁵⁷

Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana.⁵⁸

Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris.⁵⁹

Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah.⁶⁰

⁵⁷Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya. [http://Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm](http://LitbangKompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm).13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

⁵⁸Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya. [http://Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm](http://LitbangKompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm).13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

⁵⁹"Sejarah", *Situs Resmi Partai Golkar Sul-Sel*. <http://Sulsel.PartaiGolkar.or.id/> (28 April 2017).

⁶⁰Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya. [http://Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm](http://LitbangKompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm).13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

Pada pemilu legislatif 2009 suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Riau, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2014 meraup 14,75% suara atau 16,3% kursi parlemen dan berada di posisi kedua di bawah PDI Perjuangan.⁶¹

Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie menggelar Munas IX di Nusa Dua, Bali, pada 30 November - 3 Desember 2014. Aburizal Bakrie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 dengan mendapat dukungan 100 persen dari pemilik suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional IX tersebut.⁶²

Pada awal tahun 2015 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Golkar, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dan Agung Laksono hasil Munas Ancol, Jakarta. Setelah mengalami dinamika lebih dari setahun, dualisme tersebut kemudian berakhir dengan keluarnya SK Menkumham yang “menghidupkan” kembali kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau yang diselenggarakan pada 2009 lalu. Pemberlakuan kembali kepengurusan Riau ditegaskan dalam Surat Keputusan Menkumham dengan Nomor M.HH-02.AH.11.01/2016, yang menyatakan Menkumham mengesahkan kembali surat Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01/2012, tentang Komposisi DPP Partai Golkar. Kepengurusan yang dihidupkan selama enam bulan itu punya wewenang

⁶¹Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya. [http://Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm](http://LitbangKompas,MerunutSejarahKonflikPartaiGolonganKarya.htm).13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

⁶²Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya. [http://Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya.htm](http://LitbangKompas,MerunutSejarahKonflikPartaiGolonganKarya.htm).13 Januari 2016 (Diakses 5 Oktober 2016).

untuk menetapkan panitia Munaslub, sesuai AD/ART partai yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan.⁶³

Munaslub Partai Golkar direncanakan digelar pada April 2016 ini. Siapa yang akan terpilih sebagai Ketua Umum? Siapapun terpilih, dia akan menjadi bagian dari sejarah panjang Golkar sebagai partai politik besar di negeri ini.

b. Visi Partai Golkar

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.⁶⁴

c. Misi Partai Golkar

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

⁶³"Sejarah", *Situs Resmi Partai Golkar Sul-Sel*. <http://Sulsel.PartaiGolkar.or.id/> (28 April 2017).

⁶⁴"Visi_Misi", *Situs Resmi Partai Golkar Sul-Sel*. <http://Sulsel.PartaiGolkar.or.id/> (28 April 2017).

3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.⁶⁵

d. Tujuan Partai Golkar

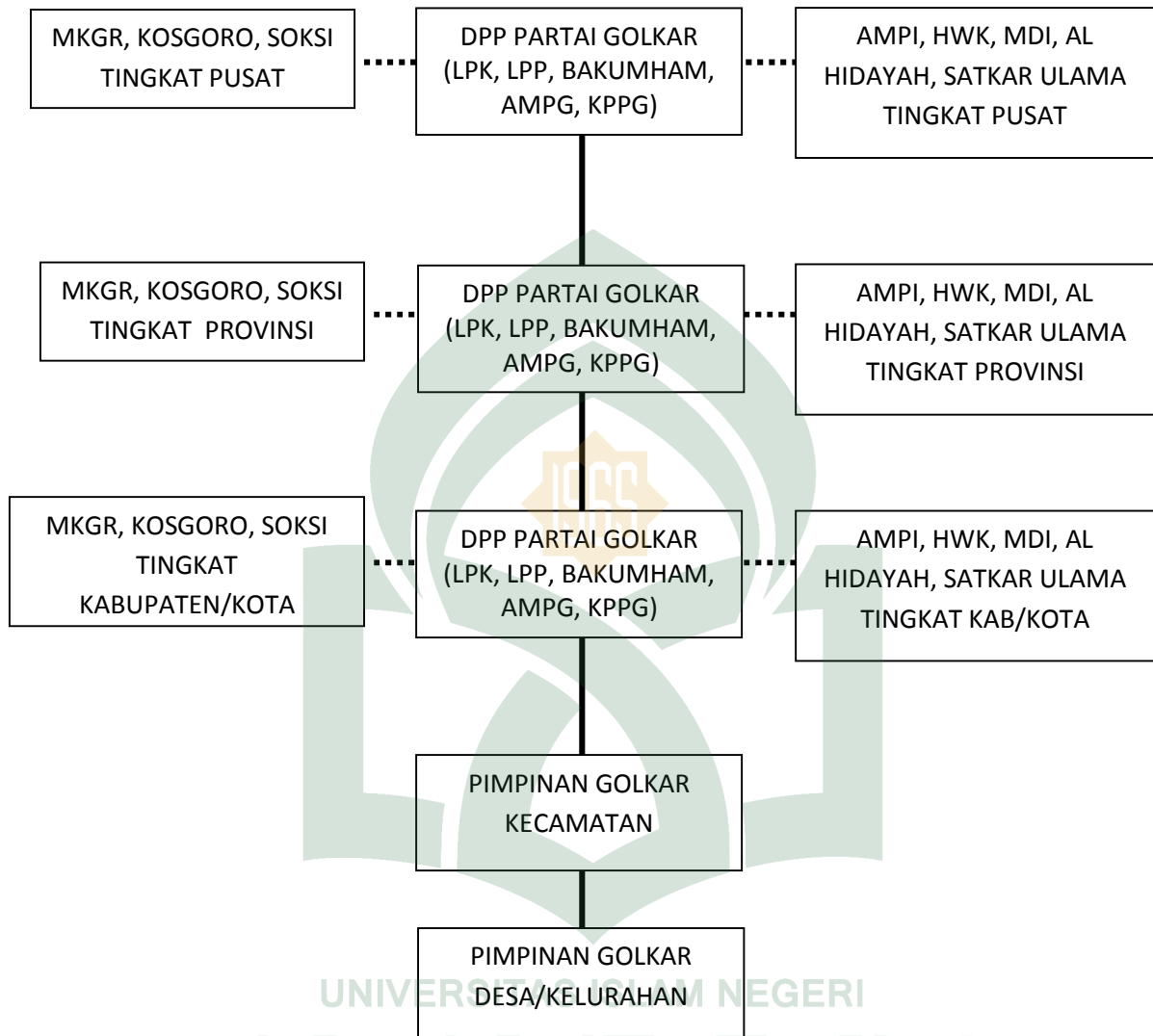
1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.⁶⁶



⁶⁵"Visi_Misi", *Situs Resmi Partai Golkar Sul-Sel*. <http://Sulsel.Partai Golkar.or.id/> (28 April 2017).

⁶⁶"Visi_Misi", *Situs Resmi Partai Golkar Sul-Sel*. <http://Sulsel.Partai Golkar.or.id/> (28 April 2017).

e. Struktur Organisasi Sayap Partai Golkar



Sumber: *Documen Partai Golkar Sul-Sel*

C. Biografi Politik Syahrul Yasin Limpo

H. Syahrul Yasin Limpo adalah anak kedua dari pasangan H. Muh. Yasin Limpo dengan Hj. Nurhayati Yasin Limpo. Syahrul lahir di Ngawing, Makassar pada tanggal 15 Maret 1955. Figur Syahrul Yasin Limpo sebagai salah satu wakil etnis Makassar berawal pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2003 mampu meraih dukungan dari berbagai pihak terlepas dari dukungan Partai Golkar, dukungan tersebut berdasarkan ikatan kekeluargaan, ikatan suku/kewilayahan, ikatan organisasi partai politik dan di luar partai politik. Ikatan kekeluargaan yang digunakan Syahrul karena didukung oleh kedudukan ayahnya H.Yasin Limpo purnawirawan tentara, mantan pejabat, tokoh Muhammadiyah; ibunya Nurhayati Yasin Limpo mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 1994-1999.⁶⁷

Pendidikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dimulai dari dia SD Neg. Mangkura-Makassar Tahun 1967, SMP Negeri 6 Makassar Tahun 1970, SMA Katolik Cendrawasih Makassar Tahun 1973, Sarjana Hukum Universitas Hasanudin (S1) Tahun 1983, Pasca Sarjana Universitas Hasanudin (S2) Tahun 1999, Pasca Sarjana Universitas Hasanudin (S2) Tahun 2004, Pascasarjana Universitas Hasanudin (S3) Tahun 2008. Dan beberapa penghargaan yang di raih oleh Syahrul Yasin Limpo seperti Perhagaan Manggala Karya Kencana-Men. Kepdd/BKKBN, Tahun , 1997, Penghargaan Bhakti Koperaso dan Pengusaha Kecil-Menkop & UKM, Tahun 1997, Penghargaan Upakarti-Presiden RI, Tahun 1997, Satya Lencana Kebaktian Sosial-Presiden RI, Tahun 1998, Satya Lencana

⁶⁷Sugiprawaty, "Etnisitas, Primordialisme, Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)", *Tesis*, (Semarang: Program Studi Magisterilmu Politik, Program Pasca Serjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2009) hal. 90.

Pembangunan-Presiden RI, Tahun 2001, Satya Lencana Wirakarya-Presiden RI, Tahun 2003. SYL saat ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama kali dipilih secara langsung. Sebelum menjabat sebagai Gubernur, SYL pernah menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Gowa selama dua periode, kemudian menjabat Wakil Gubernur selama satu periode mendampingi Amin Syam, sebelum akhirnya memenangkan pertarungan dengan Amin Syam dalam pilkada Sulsel di tahun 2007 setelah keduanya sama-sama maju bertarung sebagai calon incumbent.⁶⁸

Pada pilkada Sulawesi Selatan tahun 2007, Syahrul Yasin Limpo berpasangan dengan Agus Arifin Numang (saat itu menjabat sebagai ketua DPRD Sulsel) yang merupakan salah satu pimpinan DPD Golkar Sulsel. Pasangan tersebut diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara rival terberat Syahrul yaitu Amin Syam yang juga ketua DPD Golkar Sulsel di usung oleh koalisi Partai Golkar, Partai Kebangkitan bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat, ditambah sejumlah partai kecil lainnya. Setelah menjalani persaingan yang ketat, SYL akhirnya memenangi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007 bersama pasangannya, Agus Arifin Nu'mang.⁶⁹

⁶⁸Merdeka.Com. Profil Syahrul Yasin Limpo. <http://Merdeka.Com.ProfilSyahrulYasinLimo.htm>(Diakses 21 Mei 2017).

⁶⁹Merdeka.Com. Profil Syahrul Yasin Limpo. <http://Merdeka.Com.ProfilSyahrulYasinLimo.htm>(Diakses 21 Mei 2017).

Keputusan SYL untuk maju sebagai Calon Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak melalui pintu Partai Golkar tetapi justru diusung oleh PAN, PDK, PDIP, dan PDS, merupakan bentuk kemampuan Syahrul membangun jaringan yang luas tidak hanya mengandalkan Partai Golkar. Menyadari ketatnya persaingan di Golkar dengan keinginan Amin Syam selaku Ketua DPD Partai Golkar untuk maju kembali. Sehingga Syahrul sejak awal memilih partai politik lain sebagai pintunya, dengan mengikuti petunjuk dan cara Jusuf Kalla maju ke Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 yang tidak melalui pintu Golkar.⁷⁰

Yasin Limpo juga mewariskan modal yang lengkap untuk anak-anaknya menempuh jalan menjadi penguasa. Yasin Limpo bisa dikatakan memiliki segalanya untuk mendulang dukungan massa. Ia bangsawan, punya dukungan tentara, punya mesin politik, juga dukungan organisasi keagamaan serta kepemudaan. Hal ini berkaitan dengan Elit Politik dimana sekelompok orang dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting.⁷¹ Elit selalu merupakan kelompok yang terbatas secara kuantitatif dan sangat menonjol dalam peran di level atas suatu komunitas atau masyarakat.⁷²

Aktivitas Yasin Limpo ini seperti otomatis diwariskan kepada anak-anaknya. Setelah Yasin Limpo meninggal, anak-anak Yasin Limpo mengikuti

⁷⁰Sugiprawaty, "Etnisitas, Primordialisme, Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)", *Tesis*, (Semarang: Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2009) hal 102-103.

⁷¹Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal.69-70.

⁷²David Efendi, *Politik Elit Muhammadiyah Studi Tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah*, (Reviva Cendekia, 2014), hal. 24.

jejak ayahnya yang aktif di Partai Golkar ataupun Partai Golkar lainnya. Seperti ayah-ibunya, mereka pun menapaki posisi-posisi strategis.

Golkar yang dikuasai klan Yasin Limpo. Syahrul, selain sebagai gubernur, merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sulawesi Selatan periode 2009-2014. Adiknya, Ichsan, menjabat Wakil Bendahara Golkar Sulawesi Selatan. Adik Syahrul lainnya, Haris, menjabat Ketua Harian DPD Golkar Makassar. Kakak Syahrul, Tenri, menjadi Ketua DPD II Golkar Gowa. Ponakan pun ada yang menjadi pengurus DPD Golkar Sulawesi Selatan. Tidak cuma lewat Golkar, klan Limpo pun melebarkan sayap dengan masuk partai politik lain. Misalnya anak Syahrul, Indira, masuk Partai Amanat Nasional. Dewie masuk Partai Hati Nurani Rakyat.⁷³

Jiwa politik keluarga SYL menurun dari ayah dan ibunya dan itu juga terlihat di keluarga besarnya sendiri seperti Tenri Olle Yasin Limpo adalah Ketua DPD II Partai Golkar Gowa yang pernah menjadi Ketua DPRD Gowa dan kembali terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel sebelum memutuskan mundur untuk mencalonkan diri sebagai cabup, Ichsan Yasin Limpo Bupati Gowa dua periode 2005-2015, Dewi Yasin Limpo anggota DPR RI di Komisi VII membidangi infrastruktur. Sedangkan di DPP Hanura dia menjabat sebagai salah satu ketua partai. Kemudian, Irman Yasin Limpo yang sekarang menjadi penjabat Bupati Luwu Timur (Lutim). Irman merupakan birokrat dengan jabatan sebagai

⁷³Detiknews. Tercorengnya Klen Yasin Limpo. <http://Detiknews. Tercorengnya Klen Yasin Limpo.htm> (diakses 21 mei 2017).

Kepala Badan Kerja Sama Permodalan Daerah (BKPMMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.⁷⁴

Serta adiknya yang lain Haris Yasin Limpo yang dilantik menjadi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. Haris sebelum menjabat sebagai Dirut PDAM adalah Ketua Harian DPD II Golkar Makassar dan juga mantan Legislator DPRD Makassar. Beberapa keponakannya yang lain juga aktif dipangung politik seperti Indira Chunda Thita Syahrul Yasin Limpo yang juga anggota DPR-RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Adnan Purichta IYL yang juga sebagai bupati Gowa.⁷⁵

SYL memang memiliki kemampuan yang lebih menonjol dari tingkat intelektual maupun dari kemampuan membangun jaringan yang luas dari berbagai kalangan. SYL memiliki jaringan di berbagai organisasi karena kedudukannya seperti sebagai Ketua KNPI tahun 1990-1993, Ketua AMPI tahun 1993-1998, Sekretaris Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ketua FKPPi, Ketua FORKI, Ketua Pramuka, Ketua KOSGORO, Ketua IKA FH Unhas, dan penyiar di Radio Suara Celebes miliknya serta masih banyak lagi organisasi yang ditekuninya.⁷⁶

⁷⁴Republika.Co.Id. Makassar, Dinasti Politik Dewi Syahrul Yasin Limpo Limpo <http://Republika.Co.Id>, Makassar. Dinasti Politikdewi yasin limpo.htm (Diakses 11 Mei 2017).

⁷⁵Republika.Co.Id. Makassar, Dinasti Politik Dewi Syahrul Yasin Limpo Limpo <http://Republika.Co.Id>, Makassar. Dinasti Politikdewi yasin limpo.htm (Diakses 11 Mei 2017).

⁷⁶Sugiprawaty, "Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)", *Tesis*, (Semarang: Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2009) hal. 92.

SYL diangkat menjadi bupati di Gowa pada tahun 1994 dan diangkat kembali pada tahun 1999. Pada tahun 2003, parlemen provinsi memilihnya sebagai wakil gubernur provinsi Sulawesi Selatan. SYL memenangkan pemilihan langsung gubernur pada tahun 2007 dan 2013. Adik laki-laki Syahrul, Ichsan Yasin Limpo alias Ongkeng memasuki parlemen Sulawesi Selatan sebagai anggota Golkar pada tahun 1999 dan memenangkan pemilihan kembali pada tahun 2004. Pada tahun 2005, dia mencalonkan diri untuk bupati Dari Gowa dan menang. Ichsan terpilih kembali pada 2010.⁷⁷

SYL yang memiliki pengalaman kepemimpinan dalam pemerintahan serta memiliki jaringan dan pengaruh yang luas dalam kelompok etnis/wilayah Makassar dan organisasi kemasyarakatan terutama dalam FKPPI, AMPI, Pramuka, dan Muhammadiyah, dimana orangtuanya adalah purnawirawan tentara, mantan pejabat, tokoh pembina Pramuka, dan tokoh Muhammadiyah yang kesemuanya merupakan organisasi yang mempunyai banyak anggota yang tersebar di Sulawesi Selatan, sehingga dari hubungan-hubungan subjektif dari anggota organisasi-organisasi tersebut yang kebetulan juga memiliki kedudukan sebagai ketua partai atau pengurus partai mendasari alasan objektif partai untuk mendukungnya. Sementara hubungannya dengan Partai Damai Sejahtera yang beraliran Kristen lebih disebabkan kedekatannya dengan tokoh-tokoh agama Kristen karena Syahrul yang alumni Sekolah Katolik Cenderawasih masih tetap

⁷⁷Michael Buehler, *Married A Children*, Asisten Profesor di Northern Illinois University, <http://www.insideindonesia.org/married-with-children> (Di Akses 6 Mei 2017)

menjalin hubungan baik dengan almamater dan teman-temannya. Keuntungan itulah yang memudahkannya memasuki komunitas Kristen di Sulawesi Selatan.⁷⁸

D. Partai Golkar Dibawah Kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo 2009-2014

Berbicara mengenai Golkar memang selalau menarik karena provinsi Sulawesi Selatan selalu saja menjadi salah satu lumbung suara beringin secara Nasional. Ketika provinsi lain satu persatu tumbang tak kuasa melaan serangan partai lain, Golkar Sul-Sel tetap kokoh sebagai dominator.

Meski demikian Golkar Sul-Sel kini tengah bekerja keras dalam mengatasi situasi tersulitnya sejak era reformasi partai penguasa sepanjang era orde baru itu kini bersiap menyingkap keterpurukanya, meski tetap menjadi pemenang, harus di akui Partai Golkar memang mengalami kemunduran.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait menurunnya perolehan suara Golkar seperti yang dituturkan oleh Arief Wicaksono S.IP.,M.A selaku Pengamat Politik mengatakan bahwa:

“Kamu bisa lihat selama dua priode kepemimpinan pak Syahrul atas Golkar Sul-Sel periode pertama berapa jumlah kursinya, perioide ke dua berapa jumlah kursinya, nah oleh Nurdin Halid itu dianggap turun dimana 2009 golkar masih lebih banyak kursinya di bandingkan 2014 makanya secara organisasional Nurdin Halid mau mereformasi Golkar Sul-Sel”⁷⁹

Kemunduran Partai Golkar terutama jika ukuranya adalah jumlah presentase perolehan pada Pemilu 2004 Golkar masih sanggup maraup suara 43%

⁷⁸Sugiprawaty, “Etnisitas, Primordialisme, Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)”, *Tesis*, (Semarang: Program Studi Magisterilmu Politik, Program Pasca Serjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2009) hal. 111.

⁷⁹Arief WicaksonoS.IP.,M.A, Pengamat Politik, *Wawancara*, Makassar, tgl 21 April 2017 pukul 10.30 WITA

di Pemilu 2009 suara meraka berkurang 7% menjadi 36% jumlah itu kemudian ter5erus di pemilu 2014 menjadi hanya 20%.

Tabel I
Perbandingan Data Perolehan Suara Partai Golkar di Sul-Sel Pada
Pemilu 2009 dan 2014

PEMILU	2009	2014
DAPIL SULSEL I	-Jumlah Kursi: 3 -Total Perolehan Suara: 293.147 -Jumlah suara sah 1.231.264	- Jumlah Kursi: 1 - Total Perolehan Suara: 205.288 - Jumlah Suara Sah: 1.454.596
DAPIL SULSEL II	- Jumlah Kursi: 4 - Total Perolehan Suara: 416.072 - Jumlah Suara Sah: 1.357.090	- Jumlah Kursi: 2 - Total Perolehan Suara: 373.964 - Jumlah Suara Sah: 1.623.915
DAPIL SULSEL III	- Jumlah Kursi: 2 - Total Perolehan Suara: 216.623 - Jumlah Suara Sah: 1.100.416	- Jumlah Kursi: 2 - Total Perolehan Suara: 305.589 - Jumlah Suara Sah: 1.325.65

Catatan:

- Jumlah Peserta Pemilu 2009: 38 Parpol dan DPT 5.630.977

- Jumlah Peserta 12 Parpol dan DPT: 6.258.843

Sumber Data: *Rakyatku.Com, Makassar*

Perolehan suara Partai Golkar di masa SYL memang menurun di bandingkan dengan pada masa Amin Syam di Pemilu 2009. Pada Dapil Sul-Sel I pada tahun 2009 jumlah kursi yang di peroleh Partai Golkar sebanyak 3 kursi berbeda pada tahun 2014 hanya memperoleh 1 kursi. Pada Dapil Sul-Sel II pada

tahun 2009 jumlah kursi yang di peroleh Partai Golkar sebanyak 4 kursi berbeda pada tahun 2014 hanya memperoleh 2 kursi. Sedangkan pada Dapil Sul-Sel III pada tahun 2009 jumlah kursi yang di peroleh Partai Golkar sebanyak 2 kursi sedangkan pada tahun 2014 tidak ada peningkatan. Ini membuktikan bahwa pemengangan Partai Golkar pada tahun 2009 dan tahun 2014 ada penurunan terutama pada Dapil Sul-Sel I dan II sedangkan pada dapil Sul-Sel III tidak ada peningkatan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait menurunnya perolehan suara Partai Golkar dimasa Syahrul Yasin Limpo seperti yang di tuturkan oleh Drs. H. Ahkam Supu selaku Elit Politik Partai Golkar Makassar mengatakan bahwa:

“Memang benar penurunan drastis kursi di periode pak Syahrul sebelum di periode pak Amin Syam, sekarang di masa pak syahrul kursi di provinsi hanya 18 yang sebelumnya di masa pak Syahrul lebih 20 saya agak lupa yang jelas memang signifikan penurunanya.”⁸⁰

Golkar Sulsel menyumbang 9 kursi ke Senayan dari 38 peserta parpol. Dapil I Sulsel meraih 3 kursi, kemudian 4 kursi dari dapil II dan 2 kursi dari dapil III. Total perolehan suara Partai Golkar adalah 925.842 suara dari 3.688.770 jumlah suara sah. Beringin masih nomor 1 di Sulsel. Sedangkan Pada Pemilu 2014 di era komando SYL, Golkar masih menyandang status juara meski perolehan kursinya menurun menjadi 5 kursi dengan total perolehan suara 884.841.⁸¹

⁸⁰Drs. H. Ahkam Supu, Elit Partai Golkar Makassar, *Wawancara*, Makassar, tgl 18 Mei 2017 pukul 14.00 WITA.

⁸¹Rakyatku.Com, Makassar, Kurang Tepat Golkar Sul-Sel Merosot Di Era SYL 18 <http://Rakyatku.Com,Makassar, Kurang Tepat Golkar Sul-Sel Merosot Di Era SYL 18.htm>. Oktober 2016. (Diakses 6 Mei 2017)

Adapun berupa riset yang dilakukan oleh Tribun Timur Makassar terkait menurunnya perolehan suara Partai Golkar dimasa SYL seperti yang di tuturkan oleh Fahd El Fouz A Rafiq selaku Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mengatakan bahwa:

"Kita sudah lakukan survei bulan Januari, tiga kali survei bahkan Golkar yang tadinya Golkar basis di Sulsel turun di bawah kepemimpinan Pak Syahrul Yasin Limpo". Dulu zaman orangtua Pak Imran (Amin Syam) hampir semua ketua (DPD II Golkar Kabupaten/kota di Sulsel) itu bupati," tambah Fahd sembari melirik putra Gubernur Sulsel Periode 2003-2008, Mayjen (Purn) Amin Syam, Imran Tenri Tatta Amin Syam, yang duduk bersama elit DPD KNPI Sulsel yang diketuai Yasir Mahmud. "Sekarang kita kehilangan kursi di DPR, kita pernah 12 kursi DPR RI, lalu turun sepuluh kursi, kemudian turun lagi delapan, dan sekarang tinggal lima kursi,"⁸²

Pada pemilihan Gubernur sebelumnya, keputusan Syahrul menerima tawaran berpasangan dengan Amin Syam membuahkan kemenangan bagi pasangan Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003 yang lalu. Kemudian pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007 kemarin, Syahrul muncul sebagai kandidat gubernur dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang untuk pertama kalinya diadakan pemilihan langsung yang membawa angin segar bagi etnis Makassar yang selama pemerintahan orde baru tidak mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi bergengsi tersebut yang disebabkan sistem pemilihan yang tertutup. Sekaligus merupakan kesempatan bagi etnis Makassar untuk berkompetisi secara *fair* dengan wakil dari etnis Bugis. Syahrul yang muncul sebagai representasi etnis Makassar tidak lepas dari kesuksesannya memimpin Kabupaten Gowa selama dua

⁸²Fahd El Fouz A Rafiq, Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), *Wawancara Riset*, Tribun Timur.Com, Makassar, tgl 26 Maret 2017.

periode yang kemudian mengantarkannya menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003.

Tabel II

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan 2007

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara	Presentase %
1.	H.M. Amin Syam Dan Prof.Dr.H.Mansyur Ramly	1.404.910	38,76%
2.	H. Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar dan Ir.H.Mubyl Handaling	786.792	21,71%
3.	H.Syahrul Yasin Limpo, S.H,M.Si,M.H dan Ir.H. Agus Arifin Nu'mang, M.S	1.432.572	39,53%
	Jumlah	3.624.274	100%

Sumber Data: KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil perolehan suara yang diterima KPU Provinsi Sulawesi Selatan, perolehan suara pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang adalah 1.432.572 suara dengan presentase 38,76% atau unggul 27.662 suara dari pasangan Amin Syam-Mansyur Ramly yang memperoleh 1.404.910 suara, dengan presentase 21,71%. Sedangkan pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar-Mubyl Handaling yang hanya memperoleh 786.792 suara dengan presentase 21,71%. Hasil perolehan suara suara Aziz Qahhar Mudzakkar-Mubyl Handaling sangat berbeda jauh dengan perolehan suara pasangan yang lain.

Tabel III

Peta Dukungan Partai Politik Terhadap Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Partai Politik Yang Mendukung
H.M. Amin Syam dan Prof.Dr.H. Mansyur Ramly	Partai Golkar 1.644.635 (43,85%) PKS 266.314 (7,10%) Partai Demokrat 99.107 (2,64%) PKB 65.751 (1,75%) PKPI 57.736 (1,54%) PBSD 14.983 (0,40%)
H. Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar dan Ir.H. Mubyl Handaling	PPP 240.417 (6,41%) PBB 110.235 (2,94%) Partai Merdeka 80.951 (2,16%) PSI 53.292 (1,42%) PPD 32.708 (0,87%) PPIB 24.042 (0,64%) PPNUI 28.409 (0,76%) PNBK 23.533 (0,63%)
H.Syahrul Yasin Limpo S.H, M.Si, M.H dan Ir.H. Agus Arifin Nu'mang, M.S	PAN 257.861 (6,88%) PDK 251.715 (6,71%) PDIP 184.563 (4,92%) PDS 71.445 (1,91%)

Sumber Data: *Data Hasil Olahan 2009.*

Peta dukungan Partai Politik Terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 bisa dilihat bahwa pasangan H.M. Amin Syam dan Prof.Dr.H. Mansyur Ramly memperoleh dukungan Partai Politik sebanyak 6 yang terdiri dari Partai Golkar 1.644.635 (43,85%), PKS 266.314 (7,10%), Partai Demokrat 99.107 (2,64%), PKB 65.751 (1,75%), PKPI 57.736 (1,54%), PBSD 14.983 (0,40%). Dan dari pasangan H. Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar dan Ir.H. Mubyl Handaling memperoleh dukungan Partai Politik sebanyak 8 yang terdiri dari PPP 240.417 (6,41%), PBB 110.235 (2,94%), Partai Merdeka 80.951 (2,16%), PSI 53.292 (1,42%), PPD 32.708 (0,87%), PPIB 24.042 (0,64%), PPNUI 28.409 (0,76%), PNBK 23.533 (0,63%). Sedangkan pasangan H.Syahrul Yasin

Limpo S.H, M.Si, M.H dan Ir.H. Agus Arifin Nu'mang, M.S memperoleh dukungan Partai Politik sebanyak 4 yang terdiri dari PAN 257.861 (6,88%), PDK 251.715 (6,71%), PDIP 184.563 (4,92%), PDS 71.445 (1,91%).

Walaupun Syahrul maju sebagai Calon Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak melalui pintu Partai Golkar tetapi justru diusung oleh PAN, PDK, PDIP, dan PDS, merupakan bentuk kemampuan Syahrul membangun jaringan yang luas tidak hanya mengandalkan Partai Golkar. Dan terbukti Syahrul bisa menang walaupun minim dukungan oleh Partai Politik, dibandingkan dengan pasangan yang lain yang memiliki banyak dukungan dari Partai Politik.

Di tahun 2013 pasangan *incumbent* Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang (Sayang) kembali mencalonkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sul-Sel dengan No Urut 2, sedangkan lawannya Ilham Arief Sirajuddin dan Abd Aziz Qahhar Mudzakkar (AI) dengan No Urut 1, dan Andi Rudiyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) dengan No Urut 3.

Tabel IV

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan 2013

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara	Presentase %
1.	Ilham Arief Sirajuddin dan Abd Aziz Qahhar Mudzakkar	1.785.580	41,57 %

2.	Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang	2.251.407	52,42 %
3.	Andi Rudyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi	257.973	6,01%

Catatan:

- 4.294.960 suara sah.

- 6.279.350 pemilih yang terdaftar

Sumber Data: *Tribunnews.Com*

Pada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sul-Sel 2013 yang dimenangkan oleh pasangan *incumbent* Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang dengan perolehan suara 2.251.407 presentase 52,42 %. Pasangan dengan No urut 1 Ilham Arief Sirajuddin dan Abd Aziz Qahhar Mudzakkar dengan perolehan suara 1.785.580 presentase 41,57 %. Sedangkan pasangan dengan No urut 3 Andi Rudyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi dengan hanya memperoleh suara 257.973 presentase 6,01%.

Tabel V

Peta Dukungan Partai Politik Terhadap Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Partai Politik Yang Mendukung	Jumlah Kabupaten/Kota Pemenangan
Ilham Arief Sirajuddin dan Abd Aziz Qahhar	-Partai Demokrat -Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9 kabupaten/kota

Mudzakkar	-Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	
Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang	- Partai Golongan Karya (Golkar) -Partai Amanat Nasional (PAN) -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) -Partai Persatuan Pembangunan (PPP) -Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) -Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) -Partai Damai Sejahtera (PDS) -Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	14 kabupaten/kota
Andi Rudyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi	-Partai Gerindra	1 Kabupaten/Kota

Sumber Data: *Tribunnews.Com Dan Wikipedia.*

Peta dukungan Partai Politik terhadap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 bisa dilihat dari pasangan No urut 1 Ilham Arief Sirajuddin dan Abd Aziz Qahhar Mudzakkar memperoleh dukungan Partai Politik sebanyak 3 yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan jumlah kemenangan Kabupaten/Kota sebanyak 9. Pasangan No urut 2 Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang memperoleh dukungan Partai Politik sebanyak 8 yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dengan jumlah kemenangan Kabupaten/Kota sebanyak 14. Sedangkan pasangan No urut 3 Andi Rudyanto Aspadandan Andi Nawir Pasinringi memperoleh dukungan Partai Politik hanya 1 yang terdiri dari Partai Gerindra dengan jumlah kemenangan Kabupaten/Kota hanya 1.

E. Penyebab Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo Sebagai Ketua DPD SUL-SEL

Partai Golkar di penghujung tahun 2014 menampilkan drama menarik, yaitu diselenggarakannya dua Munas ke-9. Munas pertama diselenggarakan di Balikpapan tanggal 30 Nopember-3 Desember yang menghasilkan keputusan bahwa Aburizal Bakrie kembali ditunjuk menjadi ketua umum secara aklamasi. Sedangkan, munas kedua diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5-7 Desember dengan keputusan menolak hasil munas di Bali karena dinilai tidak sesuai AD/ART Partai Golkar di mana pemilihan ketua umum dipilih secara demokratis.

Perselisihan tersebut juga memunculkan dua kubu yang berseteru, yaitu kubu Munas Bali yang diketuai oleh Aburizal Bakrie itu sendiri, sementara kubu munas Jakarta diketuai oleh Agung Laksono. Adanya perselisihan ditubuh Partai Golkar ini jika dikontekskan dengan teorinya Timothy J. Power sangat relevan. Hal ini dikarenakan, pertumbuhan dan perkembangan sistem multipartai melalui dua tahapan utama, dan Partai Golkar telah melewati tahap pertama sebagai tahap

permulaan yang mana dihitung sejak reformasi yang rentang waktunya sudah melewati 5-10 tahun sehingga Partai Golkar menempati tahapan kedua, yaitu: pelibatan pelembagaan partai dalam memperkuat partai itu sendiri. Oleh karena itu, adanya konflik atau perbedaan pendapat di tubuh Partai Golkar merupakan salah satu dinamikanya.⁸³

Partai Golkar yang kini berkonflik juga sebenarnya sedang dituntut untuk menyelesaikan permasalahan internalnya sendiri dan juga sedang diuji apakah mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelembagaan konflik. Artinya, pelembagaan konflik yang dimaksudkan adalah partai politik tidak terkecuali Partai Golkar merupakan wadah konflik, peserta konflik, dan bertugas menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, Partai Golkar dalam hal ini seharusnya mampu mengatur dan menyelesaikan konflik di dalam tubuhnya sendiri, baru kemudian bersaing dengan partai lain sebagai peserta konflik dengan *fair*, dan berusaha menyelesaikan konflik dalam masyarakat.⁸⁴

Kekisruhan dalam Partai Golkar diawali oleh adanya perbedaan pendapat masing-masing elit Partai Golkar yang nampaknya 'seolah-olah' membuat Partai Golkar goyah dan menjurus kepada perpecahan. Terjadinya konflik tidak jauh berbeda dengan urusan kepengurusan atau jabatan tertinggi di Partai Golkar yang diperebutkan sebagai arena konflik. Hal ini berkaitan dengan Institusionalisme normatif menggambarkan organisasi sebagai *System Of Belief*. Para aktor lebih berfungsi sebagai anggota asosiasi profesi atau *Corp* daripada mahluk kalkulatif

⁸³Yulion Zalpha. "Analisis Konflik Pada Munas Golkar 2014", *Jurnal*, Vol. 22. No 1, 2016 hal 167.

⁸⁴Yulion Zalpha. "Analisis Konflik Pada Munas Golkar 2014", *Jurnal*, Vol. 22. No 1, 2016 hal 168.

dan selalu memaksimalkan kepuasan pribadinya. Para individu terikat pada nilai-nilai umum dan akan menentukan tingkat kecenderungan mereka untuk berubah tetapi juga kapasitas organisasi untuk memproduksi.⁸⁵

Namun demikian, kesadaran bahwa Partai Golkar juga merupakan lembaga konflik inilah yang belum muncul sehingga menghadirkan munas ganda dengan klaimnya masing-masing. Oleh karena itu, Partai Golkar belum menemukan titik temu ataupun konsensus di antara pelbagai kelompok/golongan yang memperjuangkan kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini konflik internal yang terjadi juga akibat dari aturan yang ditetapkan oleh AD/ART Partai Golkar itu sendiri belum terlembaga dengan sempurna. Dengan kata lain, spekulasi yang kemudian berkembang adalah bagaimana suatu partai politik belum dapat menyelesaikan konflik internalnya hendak mengurus permasalahan/konflik di masyarakat yang begitu luas, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal.⁸⁶

Setidaknya kedua kubu yang berkonflik sudah memiliki iktikat baik untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Desember 2014. Di pihak Aburial Bakrie diwakili oleh M.S. Hidayat dan Sharif Cicip Sutardjo, sementara di kubu Agung Laksono diwakili oleh Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Andi Matalatta, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Ibnu Munzir. Dalam kesempatan tersebut dibahas tentang upaya rekonsiliasi yang dinilai sesuai visi dan misi Partai Golkar. Oleh karena itu apabila upaya initerus berlanjut bukan mustahil kedua kubu yang berbeda pendapat ini akan berdamai.

⁸⁵Rizki Kurniasari, Refi Agus Refina I Gde Fajar Kurniawan, "Metodologi Penelitian Non-Positivisme", (Pendidikan Profesi Akuntan & Pasca Serjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2015) hal. 5

⁸⁶Yulion Zalpha. "Analisis Konflik Pada Munas Golkar 2014", *Jurnal*, Vol. 22. No 1, 2016 hal 169.

Namun demikian, dalam pertemuan kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Januari 2015 akan dibahas topik menarik terkait posisi Partai Golkar di Koalisi Merah Putih (KMP) juga permasalahan RUU Pilkada yang sudah disahkan. Hal ini dikarenakan, kubu Agung Laksono disamping mengkritik pemilihan Abu Risal Bakrie yang tidak demokratis juga permasalahan posisi Golkar itu sendiri sehingga Partai Golkar 'seolah-olah' hendak meninggalkan Koalisi mMerah Putih (KMP) dengan alasan bahwa posisi Partai Golkar pascareformasi selalu berada di posisi koalisi dengan pemerintah.⁸⁷

Posisi Partai Golkar dalam koalisi ini dapat dikategorikan maksimalisasi kekuasaan atau sebanyak mungkin memperoleh kursi di parlemen dan mengabaikan partai yang tidak perlu. Oleh karena itu, koalisi Partai Golkar dalam KMP adalah dibentuk tanpa memperdulikan posisi partai dan ideologi yang dianutnya. Dengan kata lain, koalisi tersebut adalah wujud bagaimana partai politik hanya berkutat pada rebut kekuasaan dan apabila kalah jegal kekuasaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kinerja di parlemen justru sedikit menghambat kinerja pemerintahan sekarang hingga waktunya reses masih juga belum memberikan sumbangsi apa-apa sehingga kubu Agung merasa tidak nyaman dengan situasi semacam itu.

Permasalahan koalisi ini jika dipahami dengan baik tidak hanya melulu berkutat pada rebut, raih, dan jegal kekuasaan semata. Namun demikian, koalisi itu pada hakikatnya merupakan cermin langsung dari keberagaman masyarakat Indonesia yang memang masih terbelah dengan nilai primordialnya. Oleh karena

⁸⁷Yulion Zalpha. "Analisis Konflik Pada Munas Golkar 2014", *Jurnal*, Vol. 22. No 1, 2016 hal 169.

itu, koalisi itu hadir untuk menjembatannya. Menurut Arend Lipjhart, adanya koalisi ini akan diperoleh konsensus atau musyawarah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan sistem demokrasi. Dengan katalain, dengan membangun koalisi bersama KMP ini seharusnya Partai Golkar mampu mengembangkan naluri kerjasama yang juga harus didasari oleh pertimbangan strategis berupa nilai-nilai yang diperjuangkan partai untukkonstituennya.⁸⁸

Perbedaan tarikan kepentingan politik menjadi asal terjadinya dua versi Munas Partai Golkar tersebut. Pokok persoalan yang digugat kubu Munas Ancol adalah ketidakmampuan Golkar mengusung Calon Presiden ataupun Wakil Presiden sendiri. Posisi Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden Joko Widodo saat itu justru diusung partai lain. Oleh karena itulah, tokoh-tokoh kubu Munas Ancol, yaitu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Priyo Budi Santoso, menamakan diri "Tim Penyelamat Partai Golkar".

Saling gugat antara kedua kubu berlangsung dalam periode sepanjang 2015. Keputusan Mahkamah Partai Golkar pun bersifat mendua. Empat hakim Mahkamah Partai memberikan keputusan mendua, dua hakim memenangkan munas kubu Ancol, sementara dua lainnya meminta kubu Ancol menerima kubu Munas Bali. Sampai dengan awal 2016 ini, konflik kedua kubu masih runcing.

Ketua umum Partai Golkar saat in ialah Setya Novanto (Setnov) yang berhasil meraih suara terbanyak pada voting tertutup yang di gelar dalam Munaslub Partai Golkar. Dimana proses pemilihan berlangsung cukup alot setelah

⁸⁸Yulion Zalpha. "Analisis Konflik Pada Munas Golkar 2014", *Jurnal*, Vol. 22. No 1, 2016 hal 169.

Novanto dan Ade Kamaruddin berhasil meraih 30 persen suara pada putaran pertama, Novanto meraih 277 suara, Ade Kamaruddin meraih 173 suara, Aziz Syamsuddin: 48 suara, Syahrul Yasin Limpo: 27 suara, Airlangga Hartarto: 14 suara, Mahyudin: 2 suara, Priyo Budi Santoso: 1 suara, Indra Bambang Utoyo: 1 suara. Sebenarnya Ade Kamaruddin masih bisa menantang Setya Novanto pada putaran kedua karena perolehan suaranya di atas 30 persen. Namun Ade Kamaruddin menyatakan mundur dan tidak menghendaki dilakukan pemilihan putaran kedua. Akom tentu sudah berhitung. Jika pun dipaksakan, kans yang dimiliki sangat kecil. Di sisi lain, jika sampai kalah, kengototannya bisa berdampak pada pelengseran dirinya dari jabatan ketua DPR. Dengan kebesaran dirinya mundur dari putaran kedua, tentu Setnov tidak akan berani mengutak-atik kursi ketua DPR karena bagaimana pun Ade Kamaruddin memiliki pendukung yang lumayan signifikan.

Kini, di bawah kepemimpinan Setya Novanto, dan Ical yang menduduki posisi ketua Dewan Penasehat. Setnov tentu memiliki agenda-agenda politik tersendiri. Sebagai mantan bendahara Golkar yang sangat piawai mendulang rupiah, Setnov akan membawa Golkar menjadi partai yang kuat secara finansial. Dengan kekuatan itu, Golkar tidak akan lagi menjadi subordinasi dalam percaturan politik tanah air sebagaimana yang dilakoni selama di bawah kendali Ical. Golkar tidak perlu lagi memikirkan kepentingan partai-partai yang dulu tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) karena forum Munaslub juga sudah secara resmi menyatakan Golkar keluar dari koalisi yang diinisiasi Ketua Umum

Partai Gerindra Prabowo Subianto dan kader-kader Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Komposisi kepengurusan DPP juga masih akan tetap didominasi wajah-wajah lama yang kemarin mendukung Munas Bali. Setnov hanya akan mengakomodir beberapa nama dari kubu Munas Ancol yang sudah terang-terangan mendukung dirinya seperti Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemungkinan yang paling realistis, Setnov akan menyerahkan jabatan ketua fraksi kepada Agus sehingga menutup peluang Bambang Soesatyo.

Konsolidasi di level DPD, terutama DPD II akan berlangsung kondusif karena kekuatan finansial Setnov. Pada tahun pertama kepemimpinannya, Setnov tidak akan 'memeras' DPD namun meminta loyalitas tanpa syarat. Untuk yang satu ini, Setnov memiliki ketegasan yang tidak ada dalam diri Ical. Setnov tipe pemimpin *Ndableg* sehingga kader-kader di bawah tidak akan terlalu berani mengumbar ketidakpatuhannya karena pasti akan langsung berujung pada pemecatan.

Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan seteru Setya Novanto dalam Munaslub Golkar di Bali. Keinginan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar banyak menuai kritik

Sebagai salah satu hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait tentang Eksistensi Partai Golkar kedepannya jika Syahrul menjadi Ketua Umum seperti yang dituturkan oleh A. Ali Armunanto S.IP, M.Si selaku Pengamat Politik mengatakan bahwa:

“Saya pikir tidak akan lebih baik Partai Golkar jika dipimpin oleh SYL”⁸⁹

Untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar pada Munaslub tampaknya mengalami kendala dari internal Golkar Sulsel sendiri. Pasalnya, DPD II di Sulsel belum menyatakan sikap sepenuhnya untuk mendukung Gubernur Sulsel dua periode ini untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar. Bahkan, dikabarkan beberapa ketua DPD II lainnya justru sudah mempunyai nama calon lain.

Terlihat dari Lembaga Survey Celebes Research Center (CRC) pernah melakukan survei terhadap dukungan 25 DPD Golkar se-Sulawesi Selatan sebagai pemilik suara jelang perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai Golkar Hasilnya, dari seluruh DPD yang sebelumnya diklaim calon Ketua Umum DPP Golkar SYL sangat solid mendukungnya di Munaslub, ternyata hanya ada 80 persen pemilik suara yang mengarahkan dukungannya. 20 persen mendukung calon lain.⁹⁰

Kini SYL tidak lagi memiliki jabatan apa-apa di Golkar. SYL dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait penyebab pemberhentian Syahrul Yasin Limpo seperti yang di tuturkan oleh Dr. H. M. Rudy Syahrudin MH.MBA selaku Elit Politik Partai Golkar Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

⁸⁹A. Ali Armunanto S.IP, M.Si, Pengamat Politik, *Wawancara*, Makassar tgl 18 April 2017, Pukul 15.00 Wita.

⁹⁰MakassarTerkini. 20 Persen Pemilik Suara Golkar SULSEL Tidak Dukung SYL. [http://MakassarTerkini. 20 Persen Pemilik Suara Golkar SULSEL Tidak Dukung SYL.htm](http://MakassarTerkini.20PersenPemilikSuaraGolkarSULSELTidakDukungSYL.htm). Kamis 13 oktober 2016 (Diakes 24 April 2017)

“Memang sudah masanya untuk masa bakti untuk pergantian DPD dan itu sudah mekanisme Partai”⁹¹

A.Ali Armunanto S.IP, M.Si selaku Pengamat Politik juga menambahkan terkait penyebab pemberhentian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa:

“Sebenarnya yang persoalan kemarin karena SYL menunda-nunda Munaslub dan memang sudah menjabat 2 periode dan tdk bisa menjabat lagi”⁹²

Pencopotan Syahrul langsung ditanda tangani oleh Ketua Umum Golkar Setnovdan Sekjen Golkar Idrus Marham. Posisi SYL langsung diisi oleh Plt Nurdin Halid yang sekarang menjadi ketua DPD Sul-Sel yang baru. Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai membela dan membenarkan keputusan Setya Novanto soal pencopotan Syahrul dari Ketua DPD I Sul-Sel.

Setelah pencopotan Syahrul dari Ketua DPD I Sul-Sel konflik internal yang terus terjadi terlihat pada Partai Golkar Sul-Sel dimana adanya perpecahan yang terjadi dimana ada kubu yang mendukung Syahrul dan ada yang ke kubu Nurdin Halid.

Dan ini di benarkan oleh Pak A. Ali Armunanto S.IP, M.Si selaku Pengamat Politik juga menambahkan terkait penyebab pemberhentian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa:

“Tapi yang terpenting dalam Partai Golkar Sul-Sel Syahrul kan punya kekuatan politik yang lumayan kita tidak bisa katakan luar biasa Dia adalah tokoh yang memiliki relasi yang kuat dengan tokoh-tokoh Golkar yang lain sehingga pak Syahrul ini masih memiliki kontrol walaupun sudah tidak menjadi ketua dan Implikasinya

⁹¹Dr. H. M. Rudy Syahrudin MH.MBA, Elit Politik Partai Golkar Sulawesi Selatan, Wawancara, tgl 20 Maret 2017, Pukul 16.03 Wita.

⁹²A. Ali Armunanto, Pengamat Politik, Wawancara, Makassar, tgl 18 April 2017, Pukul 15.00 Wita.

sekarang bahwa elit-elit golkar terpecah kedalam kubunya Pak Syahrul dan Pak Nurdin halid”⁹³

F. Eksistensi Partai Golkar Pasca Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo

Perseteruan antara keluarga SYL dan keluarga Nurdin Halid di Sulawesi Selatan selama beberapa tahun terakhir semakin memanas. Nurdin Halid adalah saingan lama keluarga Limpo dan patriark dari klan Sulawesi Selatan yang luas. Pada tahun 2007, misalnya, adik laki-laki Nurdin Halid, Rahman Halid gagal mencoba menjalankan SYL lagi dalam pemilihan gubernur. Pada awal 2013, Rudiyanto Asapa, yang kemudian menjadi bupati Sinjai, mengajukan penawaran melawan SYL dalam pemilihan gubernur. Rudiyanto Asapa terkait erat dengan klan Halid sejak anaknya Andi Setyo Gadhysta menikah dengan putri Nurdin Halid, Andi Nurhilda Nurdin. Sekali lagi, calon keluarga Halid kalah melawan klan Limpo. Keluarga Halid terus mencoba. Dalam pemilihan walikota di Makassar pada bulan September 2013, Kadir Halid, saudara kembarnya Rahman Halid, bersaing dengan Irman Yasin Limpo, adik laki-laki SYL.⁹⁴

Pada tahun 2009, pimpinan Golkar nasional menunjuk Nurdin Halid sebagai Koordinator Pemilihan Partai untuk Kawasan Timur Indonesia. Pemegang posisi ini menyetujui kandidat Golkar untuk pemilihan eksekutif dan legislatif. Nurdin Halid telah menggunakan kantornya untuk menumbangkan ambisi politik keluarga Limpo. Misalnya, Tenri Olle Limpo, kakak perempuan Syahrul Limpo, berencana tampil sebagai calon anggota parlemen nasional pada 2014 dalam

⁹³A. Ali Armunanto, Pengamat Politik, *Wawancara*, Makassar tgl 18 April 2017, Pukul 15.00 Wita.

⁹⁴Michael Buehler, *Married A Children*, Asisten Profesor di Northern Illinois University, <http://www.insideindonesia.org/married-with-children>, (Diakses 6 Mei 2017)

sebuah tiket partai Golkar. Nurdin Halid berhasil memblokir pencalonannya. Hal ini membuat Tenri Olle Limpo kesal sehingga harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Dia masih menjalankan tiket Golkar pada Pemilu 2014 tapi hanya untuk parlemen provinsi.⁹⁵

Nurdin Halid juga memastikan bahwa daerah pemilihan Susilo MT Harahap alias Silo, saudara ipar SYL, yang mencalonkan diri untuk Partai Golkar pada tahun 2014, digeser dari Kabupaten Pinrang dimana keluarga tersebut memiliki banyak sekutu, ke kota Makassar. Karena *manuver* ini, sekarang akan ada tiga anggota keluarga Limpo yang mencalonkan diri untuk tiga partai yang berbeda untuk duduk di parlemen nasional di daerah pemilihan yang sama. Agaknya, Nurdin Halid berharap ini akan membagi pemungutan suara untuk klan Limpo.⁹⁶

Tabel VI

Susunan pengurus Partai Golkar Sulawesi Selatan pada masa

Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid

Pengurus Partai Golkar Sulawesi Selatan 2009-2015 Di Bawah Kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo	Pengurus Partai Golkar Sulawesi Selatan 2007 Di Bawah Kepemimpinan Nurdin Halid
Wakil Ketua: -Moh. Roem - Ilham Arief Sirajuddin - Ince Langke IA - M. Arfandy Idris - AM. Yagkin Padjalangi - Basmin Mattayang - Ajiep Padindang	Ketua Harian: Moh Roem Wakil Ketua: -M. Arfandy Idris -H.A.M. Yagkin Padjalangi -H.A. Kadir Halid -Subhan Jaya Mappaturung -Sudarman -H. Burhanuddin Baharuddin

⁹⁵Michael Buehler, *Married A Children*, Asisten Profesor di Northern Illinois University, <http://www.insideindonesia.org/married-with-children>, (Diakses 6 Mei 2017)

⁹⁶Michael Buehler, *Married A Children*, Asisten Profesor di Northern Illinois University, <http://www.insideindonesia.org/married-with-children>, (Diakses 6 Mei 2017)

<ul style="list-style-type: none"> - A. Marzuki Wadeng - Chairul Tallu Rahim - A. Kadir Halid - Susilo MT Harahap - Abdul Madjid Tahir - A. Barlihanti Hasan - M. Ruslan - Burhanuddin Baso Tika - Musyafir Kelana AN 	<ul style="list-style-type: none"> -Muhammad Risman Pasigai -H. Armin Mustamin Toputiri -H. Abd Rahman AT -Ruslan -H.Anwar M Diah -Hj.A.Tenri Muntu Djabir -Hj.Rusni Kasman -Moh. Yushar Huduri -H.M. Zulkarnain Arief
<p>Sekretaris : Pangeran Rahim Wakil Sekretaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Burhanuddin Baharuddin - La Kama Wiyaka - Sony Budi Pandi - Sudirman Numba - A. Rahmawati Sulthani - A. Iskandar Z Lathief - A. Ina Kartika Sari - Chaidir Arif Krg Sijaya - Mukhlis Sufri - Amirullah Tahir - Muchdar Muluk Tawang - Rusni Kasman - M. Hidayat Nahwi Rasul - Luthfi Kadir - Armin Mustamin Toputiri - Syamsuddin Lagu 	<p>Sekertaris: abdillah natsir Wakil Sekertaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> -H. La Kama Wiyaka -H. Rahman Syah -Usman Genda -Mizar Rahmatullah Roem -Hj. Andi Tenry Sose -Hj. Rismawati Kadir Nyampa -Darwin Rasyid Tiro -Hj. Asmara A.H.Cawidu -Irwan Muin -Irwan Kurniawan -H. Luthfi Kadir -Partono Sumaryo -Syamsuddin Lagu -Andi Tenri Atta Latanra -Hasanuddin Baso -H. Gunadil Saleh
<p>Bedahara :Syafuruddin Nur Wakil Bendahara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoist Bachtiar - Rusdi Masse - Peter Gozal - A. Rio Idris Padjalangi - Usman Marham - Rusdin Abdullah - Syamsul Zainal - Deyong Kurniawan - Adb. Rahmat AT - M. Zulkarnaen Arief - Ferdy M. Andi Lolo - A. Tenri Muntu Jabir - Andi Muzakkar - A. Muh. Irsan Idris Galigo - Maddo Pammusu - Chandra Najib Symsuddin DL 	<p>Bendahara: H.M Rusdin Abdullah Wakil bendahara:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Peter Gozal -H.A.Asrul Arson -Hj. Heriyani -M. Yasir Machmud -H. Sjamsuddin Zainal -Nirwan Arifuddin -Hj. Andi Bulan Nanda -H. Taqhyuddin Djabbar -Sadi R. Farmadi -Ady Franky Baramuliu -Frederick Victor Palimbong -Matius Babba -Andi Dala Atiika -Andi Eva Faolia Tenri -A. Nilawati Opu Sidik -Marthen Rantetondok
Biro Kaderisasi dan Keanggotaan:	Biro Kaderisasi Dan Keanggotaan:

<ul style="list-style-type: none"> - Abd Rauf Tika - Awing Yahya - Usman Genda - Rosnani Smith 	<ul style="list-style-type: none"> -H. Mahmud Nuhung -Ikha Prawisna Muliawan -Faizal -Hamriani Hamid
Biro Organisasi: <ul style="list-style-type: none"> - Adnan Siara - Alamsyah Demma - Anwar Mappiasse - Jamila Idris - Julius Jodo Pamatan - Muh. Saleh - Julianti 	Biro Organisasi: <ul style="list-style-type: none"> -Awing Yahya -Yunius Jhody Pama'tan -Andi Ihwan Patiory -Rosmila Mustamin
Biro Pengabdian Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> - M. Pramudya Paewangi - Yosafat Tandilinting - Andi Tanriari Syamsir - Cahyana Idrus - Kahar Gani 	Biro Pengabdian Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> -Zulkhaidahnur -Kustia Nurul Fajriah -M. Arief Hamsi
Biro Hukum dan HAM: <ul style="list-style-type: none"> - M. Yaser S Wahab - Sadi Rinaldi Farmadi - Taufik Arifin - Mahyanto Masda - Risman Pasigai 	Biro Hukum Dan HAM: <ul style="list-style-type: none"> -A. Mahyanto Mazda -Aiswariah Amin -H. Tamrin Esa -Hery Syamsuddin
Biro Tani dan Nelayan: _ Mappaujung <ul style="list-style-type: none"> - Piter Petawaran - Zaenal Galib - Saleh Rahman - Muh. Said 	Biro Tani Dan Nelayan: <ul style="list-style-type: none"> -Mahmud La Kaiya -A. Mega Utari -Hj. Syahriah Kadir
Biro Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM: <ul style="list-style-type: none"> - Yudi F Arsono - Muh. Afifuddin Fattah - Aswin A Lolo - Ferdy Tanriady 	Biro Koperasi, Wirausaha Dan UKM: <ul style="list-style-type: none"> -H. Muh. Said -Agustina Hayati Dupa Melaha -Rizda Novendry
Biro, Pemuda Olahraga dan Seni: <ul style="list-style-type: none"> - Andi Tenri Atta Lantara - Fausi A. Wawo - Bhakti Baramuli - Arief Oesman 	Biro Pemuda Dan Olahraga: <ul style="list-style-type: none"> -H.A. Anugrah Bau Pessor -Christopher Aviary -Musdar Usman -Hasran Noer
Biro Pendidikan dan Pelatihan: <ul style="list-style-type: none"> - Rosmawati Natsir - Astuti Attas - Muh. Ramli - Aden Sanusi 	Biro Pendidikan Dan Cendekiawan: <ul style="list-style-type: none"> -Sugianto Pettanagara -Hasriawati Rasyid -Haeranah Alwany

- Nasruddin Upel	
Biro Perempuan: - Asmati Mustafa Djide - Asmara Cawidu - Heriyani - Musbini Musa - A. Rani Deviani Syaifuddin	Biro Pemberdayaan Perempuan Dan SDG: -Evy Segarawaty Ampri -Andi Eka Tenriabeng Prihasyanti -Andi Irma Kurniawati -Archyntia Razak
Biro Keagamaan: - Rahim Mas P. Sanjata - Mahmud Nuhung - Adinata Wijaya - Sirajuddin - Lili Mulyani	Biro Keagamaan: -Muh. Amin -Gede Durahman -Honny Anggie Kawalusan -Hj. Nurlang
Biro Informasi dan Komunikasi: - Karim Alwi Hamu - Mappiar HS - Dana Gamajaya - Patrecia Imelda - Jabal tarick Malik	Biro Media Dan Penggalangan Oponi: -M.Darwis Kusi -Bobi -Arifuddin Beddu -Ismail Wahid
Biro Penelitian Pengembangan: - Muh. Farid Kasim - A. Nurfitri Balasong - Andi Abdul Majid - A. Dala Hamsah - Muh. Tabri	Biro Pengembangan Sdm: -Usman Adami -Wahyu Permana Kaharuddin -Syarifah Fatmy Mursalim
Biro Pembangunan Daerah - A. Fachri Makkasau - A. Sugeng SA Mappanyompa - Djamaluddin Yunus - A. Silvana Rahim Wira Lestari R - Ismail - Bambang Unru	Biro Pembangunan Daerah Dan Pedesaan: -Bayu Dewabrata Mappadjantji -Andi Hunaeni Parwito -Zaenul Arifin
Biro Lingkungan Hidup: - Fachry Gaus - Jumair Wadubun - Juliasni - Syamsul Raga - Andi Tenri Abeng - Usman Adami	Biro Energi, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan: -HM. Yusuf Ashad -Annisa Tyas Palupi -A. Ria Pawallangi

Sumber Data: *Script Intermedia Newsdan Doc. Kantor Golkar Sul-Sel*

Dari daftar nama pengurus Partai Golkar Sul-Sel di masa SYL dan Nurdin

Halid dapat dilihat bahwa ada beberapa elit Partai Golkar yang dulunya loyal

dengan Syahrul Yasin Limpo, tapi setelah pemberhentian Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sul-Sel dan di gantikan oleh Nurdin Halid beberapa elit tersebut berpindah ke Nurdin Halid.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait pergantian semua pengurus setelah pemberhentian pak Syahrul seperti yang di tuturkan oleh DRS. H. Ahkam Supu selaku Elit Partai Golkar Makassar mengatakan bahwa:

“Itu Rumor, secara otomatis ketika pemberhenti kepengurusanakan berakhir masa bakti periode pak Syahrul DPD I maka berakhir semua, nah persoalan terakomodir di kepengurusan berikutnya itu persoalan kewenangan siapa yang ditunjuk menjadi Plt dan tidak ada masalah”⁹⁷

Ini membuktikan bahwa eksistensi Syahrul Yasin Limpo Di Partai Golkar Sul-Sel tidak menyeluruh dan sudah berkurang ke Elit Partai Golkar itu sendiri. Dan kebanyakan kepindahan para Elit Partai Golkar sendiri karena di lihat dari kinerja dari Elit tersebut dan di angkat kembali menjadi pengurus oleh ketua DPD Partai Golkar Sul-Sel yakni Nurdin Halid.

Berkurangnya eksistensi SYL di Partai Golkar Sul-Sel setelah pemberhentiannya membuat dirinya harus berpindah partai sudah ada beberapa Partai yang menghubungi dirinya untuk bergabung, Khususnya Partai NasDem yang sekarang diketuai oleh Rusdi Masse adalah Bupati Sidrap yang semula di Golkar Sul-Sel kemudian pindah ke Partai NasDem. Secara terang-terangan memberikan sinyal kepada Syahrul untuk bergabung dengan Partai NasDem.

A. Ali Armunanto S.IP, M.Si selaku Pengamat Politik juga menambahkan terkait isu tentang Syahrul Yasin Limpo akan pindah partai mengatakan bahwa:

⁹⁷Drs. H. Ahkam Supu, Elit Partai Golkar Makassar, *Wawancara*, Makassar, tgl 18 Mei 2017 pukul 14.00 WITA.

“Saya dengar juga NasDem memiliki kedekatan pak Syahrul apa lagi NasDem di pimpin oleh Rusdi Masse Bupati Sidrap dan saya dengar juga NasDem pusat menawarkan posisi yang cukup bergengsi jika pak Syahrul ingin pindah dengan syarat pak Syahrul mau menarik semua gerbongnya yang ada di Sul-Sel supaya pindah ke NasDem kerna NasDem kedepannya mau menggembosi Golkar di Sul-Sel”⁹⁸

Isu tentang akan pindahnya SYL ke Partai lain merupakan hal wajar menurut penulis karena untuk mempertahankan eksistensi SYL kedepannya butuh rangkulan akan partai lain, di Partai Golkar eksistensi SYL dan keluarganya mulai berkurang dan di gantikan oleh Nurdin Halid.

Eksistensi Partai Golkar selepas pemberhentian SYL dimana Nurdin Halid bukan lagi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPD I Partai Golkar Sul-Sel. Tetapi dia resmi menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sul-Sel tanpa melalaui proses Musyawarah Daerah (Musda). Bahkan Nurdin mengakui status dirinya yang bukan lagi Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sul-Sel itu berlaku sejak DPP Partai Golkar menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pengurus DPD I Partai Golkar Sul-Sel.

Nurdin Halid yang juga menambahkan sejak SK pengurus terbit maka kepengurusan Partai Golkar Sul-Sel yang ia pimpin disebut sebagai pengurus transisi. Bahkan batas waktu Nurdin Halid sebagai ketua DPD I Partai Golkar Sul-Sel juga tidak dibatasi saat ini dirinya fokus melakukan konsolidasi secara menyeluruh di semua tingkatan pengurus Partai Golkar Sul-Sel.

⁹⁸A. Ali Armunanto, Pengamat Politik, *Wawancara*, Makassar tgl 18 April 2017, Pukul 15.00 WITA.

Arief Wicaksono S.IP,.M.A selaku Pengamat Politik juga menambahkan terkait Ekistensi Partai Golkar kedepannya setelah pemberhentian Syahrul Yasin Limpo dan digantikan oleh Nurdin Halid mengatakan bahwa:

“Ada beberapa faktor sehingga Nurdin Halid datang saya dengar langsung oleh Makbul, Nurdin Halid datang ke sini untuk memperbaiki oraginisasi karena Golkar saat dipimpin oleh pak Syahrul cuma memikirkan kepentinganya jie sendiri dan keluarganya di Golkar dia tidak berfikir bagaimana Golkarnya kedepan itu katanya Makbul “⁹⁹

Jelas sekali bahwa keputusan DPP Partai Golkar mengirimkan Nurdin Halid yang dulunya menjadi Plt sekarang berubah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sul-Sel menunjukkan betapa pentingnya posisi Sul-Sel bagi eksistensi Golkar di Indonesia. Kehadiran Nurdin Halid juga menjadi pertanda bahwabanyaknya masalah serius dalam tubuh Partai Golkar Sul-Selselepas kepemimpinan SYL dan Nurdin Halid sendiri hadir untuk menyelesaikan masalah internal yang terjadi di Partai Golkar Sul-Sel.

Adapun hasil riset yang dilakukan oleh Tribun Timur Makassar terkait Ekistensi Partai Golkar kedepannya setelah pemberhentian Syahrul Yasin Limpo dan digantikan oleh Nurdin Halid yang dituturkan H.M. Rusdin Abdullah selaku Elit Partai Golkar Sulawesi Selatan:

"Semua diberikan tugas, semuanya aktif dan itu sudah sangat kelihatan, program semua jalan,Rapat terus dan itu ada evaluasinya, mana program unggulan? Jangka pendek dan mana jangka panjang."¹⁰⁰

Disisi lain Nurdin Halid ingin menunjukkan bahwa kehadirannya akan banyak mengubah pengendalian Partai Golkar Sul-Sel ini terlihat dari gaya

⁹⁹Arief Wicaksono S.IP,.M.A, Penagamat Politik, Wawancara, Makassar, tgl 21 April 2017 pukul 10.30 WITA

¹⁰⁰H.M. Rusdin Abdullah, Elit Golkar Sulawesi Selatan, Wawancara Riset, Tribun Timur.Com, Makassar, tgl 25 April 2017.

kepemimpinannya yang sangat transformatif dimana beban kerja tersalurkan dengan merata kepada kader tidak seperti pada pengurus sebelumnya yang lebih banyak bertumpu pada segelintir orang.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait Eksistensi Partai Golkar kedepannya setelah pemberhentian Syahrul Yasin Limpo dan digantikan oleh Nurdin Halid yang dituturkan oleh Ir. Arfandy Idris selaku Elit Politik Golkar Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Siapa pun yang akan menjadi Ketua Golkar Sul-Sel kami akan mendukung sepenuhnya dan sekarang yang menjadi Ketua Nurdin Halid jadi kami mesti mendukungnya sebagai kader Golkar”¹⁰¹

Dukungan yang diberikan oleh setiap kader Partai Golkar serta beban kerja yang tersalurkan merata itu kemudian dibebani target terukur sehingga semua penanggung jawab kegiatan berusaha keras menunjukkan hasil kerjanya. Jika Nurdin Halid mampu menjaga ritme gerakan maka Partai Golkar Sul-Sel mempunyai masa depan yang bagus.

Pilgub 2018 yang diiringi dengan pilkada di 12 Kabupaten/Kota akan menjadi target utama bagi Nurdin Halid untuk meningkatkan Eksistensi Partai Golkar Sul-Sel. Dimana 2018 akan menjadi landasan menuju 2019 dan sangat menentukan apakah eksistensi Partai Golkar di Sul-Sel akan tetap berlanjut atau malah akan menurun pada saat kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo.

¹⁰¹Ir. Arfandy Idris, Elit Golkar Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, tgl 24 Maret 2014 Pukul 14.00 WITA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Konflik yang terjadi pada Partai Golkar beberapa tahun yang lalu terlihat dari Munaslub Partai Golkar Di di Jakarta dan Bali dualisme ini mempengaruhi seteru Setya Novanto dan Syahrul Yasin Limpo yang sebelumnya sebagai kandidat untuk menjadi ketua DPP Partai Golkar. Yang di mana terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua. Kini Syahrul Yasin Limpo diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPDP Partai Golkar Sul-Sel. Syahrul Yasin limpo sudah tidak memiliki jabatan apa-apa di Partai Golkar Sul-Sel Dan pemberhentian Syahrul Yasin Limpo dianggap tidak terhormat. Hal ini dikarenakan pemberhentiannya tanpa melalui Mubes dan memang sudah masanya karena sudah 2 periode menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sul-Sel.
- 2) Pasca pemberhentian Syahrul Yasin Limpo kini eksistensinya di Partai Golkar Sul-Sel semakin berkurang dan membuat dirinya berkeinginan pindah Partai. Setelah elit-elit Partai Golkar Sul-Sel yang dulunya sangat mendukung Syahrul Yasin Limpo sekarang berpindah dan mendukung Nurdin Halid. Hal ini membuat semakin tidak solidnya dan terpecahnya dukungan antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid. Keputusan DPP Partai Golkar

mengirimkan Nurdin Halid Ketua DPD Partai Golkar Sul-Sel menunjukkan betapa pentingnya kehadirannya terhadap eksistensi Partai Golkar Sul-Sel kedepannya.

Kehadiran Nurdin Halid juga menjadi pertanda bahwa ada masalah serius dalam tubuh Partai Golkar Sul-Sel pasca pemberhentian Syahrul Yasin Limpo. Disisi lain Nurdin Halid ingin menunjukkan bahwa kehadirannya akan banyak mengubah pengendalian Partai Golkar Sul-Sel ini terlihat dari gaya kepemimpinannya yang sangat transformatif dimana beban kerja tersalurkan dengan merata kepada kader tidak seperti pada kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo sebelumnya yang lebih banyak bertumpu pada segelintir orang.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Implikasi Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo Sebagai Ketua Umum DPD Sul-Sel Terhadap Eksistensi Golkar Partai Golkar Sul-Sel, maka:

1. Diharapkan agar konflik internal yang terjadi di Partai Golkar Sel-Sel antara kubu Syahrul Yasin Limpo dengan Nurdin Halid cepat mendapat titik terang dan bersatu kembali demi kemajuan Partai Golkar kedepannya.
2. Diharapkan dengan tergantinya ketua DPD partai Golkar Sul-Sel yang baru oleh Nurdin Halid bisa membawa kembali kejayaan Partai Golkar Di Sul-Sel di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asmadianto "Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Selatan", *Tesis*, Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

-----, *Partisipasi Dan Partai Politik*, Jakarta: Buku Obor, 1998.

-----, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Budiono Kabul, *Teori Dan Filsafat Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Buehler, Michael. *Married A Children*, Asisten Profesor di Northern Illinois University, <http://www.insideindonesia.org/married-with-children> (Di Akses 6 Mei 2017).

Efendi, David. *Politik Elite Muhammadiyah Studi Tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah*, Reviva Cendekia, 2014.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Harrison, Lisa. *Metode penelitian politik* Jakarta: Kencana, 2009.

Hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2948), At-Tirmidziy (no. 1333), serta Al-Hakim (3/99) dan ia menshahihkannya yang kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabiy; semuanya dari hadits Abbu Maryam 'Amr Bin Murrah Al-Juhhaniy.

- Hidajat, Imam. *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Perss, 2009.
- Keller, Suzanna. *Penguasa Dan Kelompok Elite: Peranan Elite Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Kurniasari, Rizki dan Refi Agus Refina I Gde Fajar Kurniawan. “Metodologi Penelitian Non-Positivisme”, Pendidikan Profesi Akuntan & Pasca Serjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2015.
- Mahadi Helmi Dan Shohifullah, *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Mufti Muslim Dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Mubarok, Romli. Peranan Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi Pasca Reformasi Di Indonesia, *Jurnal*, Vol.10 No.1 Oktober 2012.
- Mufti, Muslim. *Teori-Teori Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Nasikhah, Muhimmatun. ”Konflik Terpecahnya Partai Golkar (Munas Bali Dan Munas Jakarta)”, *Laporan*, Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Ramanathan, K. *Konsep Azas Politik*, Jakarta: Alms Digital Enterprise, 2000.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Setiadi Elly M. Dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiprawaty. “Etnisitas, Primordialisme, Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)”, *Tesis*, Semarang:

Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Syaiful Ashar, Ahmad. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Dpd Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang", *Skripsi*, Semarang: Program Studi Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 201.

Thufail Efendi, Achmad. "Dampak Konflik Dpp Partai Golkar Terhadap DPP Partai Golkar Kota Surabaya", *Skripsi*, Surabaya: Program Studi Ilmu Politik Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2015.

Warachma T.P., Syintha. "Konflik Internal Partai Golkar Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013", *Skripsi*, Makassar: Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Dan Pemerintahan, Universitas Negeri Hasanuddin, 2011.

Zalpa, Yulion. "Analisis Konflik Pada Munas Golkar 2014", *Jurnal*, Vol. 22. No 1, 2016.

"Sejarah", *Situs Resmi Partai Golkar Sul-Sel*. [http:// Sulsel.Partai Golkar.or.id/](http://Sulsel.PartaiGolkar.or.id/) (28 April 2017).

"Visi_Misi", *Situs Resmi Partai Golkar Sul-Sel*. [http:// Sulsel.Partai Golkar.or.id/](http://Sulsel.PartaiGolkar.or.id/) (28 April 2017).

Detiknews. Tercorengnya Klen Yasin Limpo. [http://Detiknews. Tercorengnya Klen Yasin Limpo.htm](http://Detiknews.TercorengnyaKlenYasinLimpo.htm) (diakses 21 mei 2017).

IniKataPolitik. Pengurus Golkar Sidrap Tolak Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel. [http:// Pengurus Golkar Sidrap Tolak Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel – Inikatapolitik.html](http://PengurusGolkarSidrapTolakPltKetuaDPDIPartaiGolkarSulsel-Inikatapolitik.html). (Diakses 30 November 2016).

Kompas, Kemengangan Setya Novanto. 13 Januari 2016. <http://Kompas, Kemengangan Setya Novanto.htm>. (Diakses 5 Oktober 2016).

Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya. <http://Litbang Kompas, Merunut Sejarah Konflik Partai Golongan Karya 13 Januari 2016> (Diakses 5 Oktober 2016).

MakassarTerkini. 20 Persen Pemilik Suaragolkar SULSEL Tidak Dukung SYL. <http://MakassarTerkini. 20 Persen Pemilik Suaragolkar SULSEL Tidak Dukung SYL.htm>. Kamis 13 oktober 2016 (Diakes 24 April 2017).

Merdeka.Com. Profil Syahrul Yasin Limpo. <http://Merdeka.Com. Profil Syahrul Yasin Limpo> (Diakses 21 Mei 2017).

Merdeka.Com. Setnov Copot Syahrul Karena Habis Jabatannya Dan Lambat Gelar Musda. <http://Merdeka.Com. Setnov Copot Syahrul Karena Habis Jabatannya Dan Lambat Gelar Musda.htm>. 31 Agustus 2016 (Diakses 11 Oktober 2016).

Parepos. Co.id. Elit Golkar Siap Ancam Mundur. <http://Elite Golkar Sidrap Ancam Mundur – Pare Pos – Online.html>. (Diakses 30 November 2016).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019. <http://BAB II GAMABARAN UMUM KONDISI DAERAH.pdf> (diakses 19 Juni 2017).

Rakyatku.Com,Makassar, Kurang Tepat Golkar Sul-Sel Merosot Di Era SYL 18 <http://Rakyatku.Com,Makassar, Kurang Tepat Golkar Sul-Sel Merosot Di Era SYL 18.htm>. Oktober 2016. (Diakses 6 Mei 2017).

Republika.Co.Id. Makassar, Dinasti Politik Dewi Syahrul Yasin Limpo Limpo <http://Republika.Co.Id, Makassar. Dinasti Politikdewi yasin limpo> (Diakses 11 Mei 2017)